



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020-2024**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh:

AIDA AZWIR
NIM. 2130402007

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Azwir
NIM : 2130402007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024"** adalah karya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,



Aida Azwir
Aida Azwir
NIM. 2130402007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Aida Azwir NIM 2130402007** dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020–2024”**. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang *Munaqasyah*.

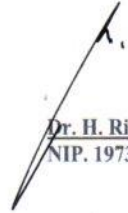
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi,
Ekonomi Syariah



Dr. Novia Nengsih, M.A.Ek., CIFA
NIP. 199011042019032008

Batusangkar, 16 Juli 2025
Pembimbing

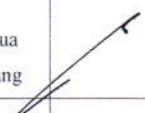
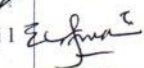



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Aida Azwir, NIM: 2130402007, judul: "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024" telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universtas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP NIP.197310072002121001	Ketua Sidang		21/08 2025
2.	Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA NIP.197406232000032002	Penguji 1		20/8 2025
3.	Mohammad Aliman Shahmi, M.E NIP.199308292022031002	Penguji 2		20/08 2025

Batusangkar, 20 Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam,



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP.197310072002121001

ABSTRAK

Aida Azwir, Nim 2130402007, Judul Skripsi “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024” Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pembangunan manusia merupakan indikator penting dalam menilai kemajuan suatu daerah, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, di Provinsi Banten masih terdapat kesenjangan capaian IPM antar kabupaten/kota meskipun tren IPM secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Kondisi ini diperburuk oleh fluktuasi Pertumbuhan Ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan kemiskinan di beberapa wilayah, yang menghambat pemerataan pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Banten selama periode 2020–2024, baik secara parsial maupun simultan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) yang dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 12.

Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikan sebesar $0.0049 < 0.05$, sedangkan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikan sebesar $0.0006 < 0.05$ dan kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikan sebesar $0.0000 < 0.05$. Secara simultan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikan $0.00 < 0.05$. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.744329 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi IPM sebesar 74.43% dan sisinya sebesar 25.57% dijelaskan oleh variabel lain.

Kata Kunci: *IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan*

ABSTRACT

Aida Azwir, NIM 2130402007, Thesis Title "The Influence of Economic Growth, Unemployment and Poverty on the Human Development Index in Districts/Cities of Banten Province in 2020-2024" Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus State Islamic University, Batusangkar.

Human development is an important indicator in assessing the progress of a region, as measured by the Human Development Index (HDI). However, in Banten Province, there is still a gap in HDI achievement between districts/cities, even though the overall HDI trend has increased annually. This condition is exacerbated by fluctuations in economic growth, high unemployment rates, and poverty in several regions, which hinder equitable human development. This study aims to analyze the influence of economic growth, unemployment rates, and poverty rates on the Human Development Index (HDI) in districts/cities in Banten Province during the 2020–2024 period, both partially and simultaneously.

The research method used is a quantitative approach with a panel data regression model. Data collection was conducted through a documentation study using secondary data obtained from publications of the Central Statistics Agency (BPS) of Banten Province. The data analysis technique in this study used panel data regression with a Random Effects Model (REM) approach, analyzed using EViews 12 software.

The results of the study found that partially Economic Growth has a positive and significant effect on the HDI with a significant value of $0.0049 < 0.05$, while unemployment has a negative and significant effect on the HDI with a significant value of $0.0006 < 0.05$ and poverty has a significant negative effect on the HDI with a significant value of $0.0000 < 0.05$. Simultaneously, Economic Growth, Unemployment and Poverty have a significant effect on the HDI with a significant value of $0.00 < 0.05$. The coefficient of determination (R^2) of 0.744329 indicates that the model is able to explain the variation in the HDI by 74.43% and its side of 25.57% is explained by other variables.

Keywords: HDI, GRDP, Unemployment, and Poverty

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	18
2. Pertumbuhan Ekonomi	24
3. Pengangguran	29
4. Kemiskinan.....	32
B. Penelitian yang Relevan.....	34
C. Keterkaitan Antar Variabel	39
D. Kerangka Berpikir.....	41
E. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46

F. Teknik Analisis Data.....	47
1. Estimasi Model Regresi Data Panel.....	48
2. Uji Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	49
3. Uji Asumsi Klasik.....	50
4. Persamaan Regresi Data Panel.....	52
5. Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi (R) ²	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B. Deskripsi Data Penelitian	57
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	57
2. Pertumbuhan Ekonomi	58
3. Pengangguran.....	61
4. Kemiskinan	63
C. Temuan Hasil Penelitian	64
1. Pemilihan Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel	64
2. Uji Asumsi Klasik.....	66
3. Persamaan Regresi Data Panel.....	69
4. Pengujian Hipotesis.....	71
5. Uji Determinasi (R) ²	73
D. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Implikasi.....	85
C. Saran.....	85

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024	3
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024	5
Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024	7
Tabel 1.4 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024	9
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow	65
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman	66
Tabel 4.3 Uji Normalitas	67
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas.....	68
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi	69
Tabel 4.7 Model Yang Terpilih <i>Random Effect Model</i> (REM).....	70
Tabel 4.8 Hasil Uji t Regresi Data Panel Metode <i>Random Effect Model</i> (REM)	71
Tabel 4.9 Hasil Uji F (Simultan)	72
Tabel 4.10 Hasil Uji Determinasi R^2	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Banten	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024	57
Grafik 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024	59
Grafik 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024	62
Grafik 4.4 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan pilar utama dalam menentukan tingkat kemajuan suatu daerah. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta standar hidup yang layak dan berkelanjutan. *United Nations Development Program (UNDP)* memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara atau daerah berhasil mencapai kesejahteraan dan kemajuan pembangunan yang berfokus pada manusia (Laode et al., 2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan tiga aspek utama dalam kualitas hidup, yaitu kesehatan yang diukur dari harapan hidup saat lahir, pendidikan yang dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang digambarkan melalui pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (Suryani, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas hidup masyarakat mengalami kemajuan. Dalam pandangan teori *human capital* yang dikemukakan oleh Gary S. Becker, manusia tidak sekedar dipandang sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai bentuk modal utama yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Teori ini menekankan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan serta kebiasaan-kebiasaan positif yang terus berkembang dalam kehidupan sehari-hari, dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ramadanisa dan Triwahyunityas, 2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai alat ukur dalam keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nyata. Tingginya nilai IPM menunjukkan bahwa masyarakat suatu daerah memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta tingkat kesejahteraan yang memadai. Sebaliknya,

rendahnya IPM mencerminkan masih adanya keterbatasan dalam pencapaian pembangunan manusia, yang pada akhirnya dapat menghambat daya saing daerah maupun keberlanjutan pembangunan (Rontos et al., 2023).

Di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya meningkatkan capaian IPM sebagai wujud komitmen dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas layanan dasar bagi seluruh masyarakat. Namun, pencapaian IPM di berbagai wilayah belum menunjukkan pemerataan yang ideal. Masih terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antarwilayah, yang menggambarkan perbedaan dalam akses dan kualitas pembangunan manusia. Fenomena ini tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi juga antarwilayah di dalam satu provinsi. Salah satu contoh yang mencolok dapat ditemukan di Provinsi Banten, yang meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan hasil pembangunan manusia. Dinamika sosial ekonomi di Banten memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di semua daerah kabupaten/kota.

Provinsi Banten, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, memiliki posisi geografis dan potensi ekonomi yang strategis. Wilayah ini menjadi pusat bagi berbagai kawasan industri, pelabuhan, serta infrastruktur pendukung pembangunan. Namun demikian, perkembangan di sektor ekonomi belum sepenuhnya sejalan dengan pemerataan pembangunan manusia. Realitas sosial menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat di Banten belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020–2024, masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar kabupaten dan kota di provinsi ini.

Berikut adalah data peningkatan IPM (UHH LF SP2020) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada periode 2020-2024.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	IPM (Poin)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pandeglang	68,86	69,02	69,70	70,28	70,88
Kabupaten Lebak	66,39	66,50	67,19	67,68	68,33
Kabupaten Tangerang	74,09	74,47	75,15	75,56	76,19
Kabupaten Serang	70,93	71,05	71,99	72,63	73,28
Kota Tangerang	79,83	80,08	80,44	80,98	81,53
Kota Cilegon	76,80	77,11	77,68	78,24	78,83
Kota Serang	75,25	75,53	76,01	76,43	76,90
Kota Tangerang Selatan	82,73	82,98	83,28	83,57	84,16
Provinsi Banten	74,41	74,68	75,25	75,77	76,35

Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Banten selama tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, IPM di seluruh wilayah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kecepatan pertumbuhannya tidak merata antar daerah. Pada tahun 2024, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang menempati posisi tertinggi dalam capaian IPM, dengan nilai masing-masing sebesar 84,16 poin dan 81,53 poin. Pencapaian ini mencerminkan kualitas layanan dasar yang relatif lebih baik, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan tingkat pengeluaran riil penduduk. Sebaliknya, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang masih menunjukkan nilai IPM yang tergolong rendah, yakni masing-masing sebesar 68,33 poin dan 70,88 poin, yang mengindikasikan keterbatasan layanan dasar dan ketimpangan pembangunan.

Perbedaan capaian ini menandakan bahwa ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah masih menjadi isu yang cukup krusial di Provinsi Banten. Kesenjangan ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021, yang memberikan tekanan berat terhadap sistem sosial dan ekonomi, khususnya di daerah dengan kapasitas layanan publik yang terbatas. Kabupaten Lebak dan Pandeglang, yang sebelumnya sudah berada di posisi rendah dalam capaian IPM, semakin tertinggal selama masa krisis. Sementara itu, wilayah dengan infrastruktur dan sumber daya yang lebih kuat, seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, mampu bertahan dan pulih lebih cepat pascapandemi. Hal ini menegaskan pentingnya ketahanan ekonomi daerah dalam mempertahankan pembangunan manusia ditengah krisis.

Pencapaian IPM di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Tiga hal yang sering dianggap berperan penting adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan dasar. Sebaliknya, tingginya angka pengangguran mencerminkan belum maksimalnya lapangan kerja yang tersedia, yang berdampak pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan manusia karena membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan riil produksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat mendorong naiknya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut pada akhirnya menjadi sarana penting untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat secara lebih merata (Hamid & Yusuf, 2023). Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah. PDRB menunjukkan total nilai barang dan jasa

yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (Prastiwi et al., 2025).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada umumnya mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, daya beli pun ikut meningkat, memungkinkan mereka untuk mengakses kebutuhan dasar secara lebih baik termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Akses yang semakin merata terhadap layanan-layanan dasar tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tiga dimensi utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan standar hidup. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan keberhasilan makro secara kuantitatif, tetapi juga menyediakan sumber daya finansial yang penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia yang lebih menyeluruh dan merata (Raihan, 2025) Berikut data laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024.

Tabel 1.2
Data Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pandeglang	-0,67	3,10	3,47	2,53	2,75
Kabupaten Lebak	-0,91	3,18	3,80	2,80	2,95
Kabupaten Tangerang	-3,76	4,70	5,47	5,18	5,00
Kabupaten Serang	-2,73	3,74	5,03	4,80	4,78
Kota Tangerang	-7,36	3,90	5,98	5,57	5,04
Kota Cilegon	-1,23	5,24	4,51	4,82	4,84
Kota Serang	-1,29	3,88	4,71	4,74	4,71
Kota Tangerang Selatan	-1,01	4,81	5,81	5,36	5,02

Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) di berbagai kabupaten/kota mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, hampir seluruh daerah di Provinsi Banten mengalami kontraksi ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang mencatat pertumbuhan negatif tertinggi, yakni -7,36% dan -3,76%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terlihat tren pemulihan ekonomi secara bertahap, dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon mencatat pertumbuhan yang konsisten di atas 5% hingga tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terendah sepanjang periode 2020-2024. Perbedaan ini salah satunya disebabkan oleh struktur ekonomi masing-masing daerah. Kota-kota seperti Tangerang dan Tangerang Selatan lebih banyak bergerak di sektor industri dan jasa yang cenderung lebih fleksibel dan punya nilai tambah tinggi. Selain itu, infrastruktur yang lebih memadai, kualitas SDM yang lebih baik, serta iklim investasi yang lebih diwilayah tersebut. Sebaliknya, Lebak dan Pandeglang yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan menghadapi keterbatasan investasi lokal dalam infrastruktur dan pelatihan keterampilan serta mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah, di mana daerah dengan basis industri dan infrastruktur yang lebih kuat mampu bangkit lebih cepat dibandingkan wilayah yang tertinggal secara struktural. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan bahwa pertumbuhan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti investasi dalam pendidikan, teknologi, dan modal manusia. Ketimpangan tersebut mencerminkan perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan mendorong pertumbuhan dari dalam.

Selain itu, tingkat pengangguran juga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu cara untuk melihat seberapa besar masalah pengangguran di suatu daerah adalah dengan melihat angka Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu kondisi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Tingginya angka pengangguran bisa menghambat peningkatan produktivitas di suatu daerah, dan secara sosial menjadi beban yang cukup berat bagi masyarakat. Lambat laun, kondisi ini bisa membuat semakin banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan (Hermawan, 2015). Tingkat pengangguran yang tinggi biasanya berkaitan dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketika banyak orang menganggur, artinya lapangan kerja tidak mampu menampung tenaga kerja yang ada. Akibatnya, pendapatan masyarakat menurun dan mereka jadi lebih sulit mengakses layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan, yang akhirnya dapat menghambat peningkatan kualitas pembangunan manusia dan menurunkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut data Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024.

Tabel 1.3
Data Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	TPT (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pandeglang	9,15	7,70	9,24	9,05	8,09
Kabupaten Lebak	9,63	7,86	8,55	7,57	6,23
Kabupaten Tangerang	13,06	9,06	7,88	6,94	6,06
Kabupaten Serang	12,22	10,58	10,61	9,94	9,18
Kota Tangerang	8,63	9,07	7,16	6,76	5,92
Kota Cilegon	12,69	10,13	8,10	7,25	6,08
Kota Serang	9,26	9,41	8,17	7,45	7,12
Kota Tangerang Selatan	8,48	8,60	6,59	5,81	5,09

Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan di setiap Kabupaten dan Kota. Secara umum, hampir seluruh daerah mengalami

peningkatan angka pengangguran pada tahun 2020, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia kerja. Meskipun ada, beberapa daerah tetap memiliki angka pengangguran yang relative tinggi seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang cenderung memiliki angka pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan konsisten menjadi daerah dengan TPT terendah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja formal di daerah perkotaan, tingkat pendidikan penduduk, serta daya serap industri dan sektor jasa.

Meskipun IPM terus mengalami peningkatan, fluktuasi dalam TPT menunjukkan bahwa perbaikan kualitas hidup belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat disebabkan karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat jika dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan atau ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa kenaikan IPM tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara seimbang.

Selain pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan juga berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemiskinan adalah keadaan di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik dalam aspek materi maupun non-materi. Kemiskinan bukan hanya persoalan yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merupakan masalah struktural yang dapat berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi suatu Negara (Maskur et al., 2023). Kemiskinan bisa menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Padahal, inti dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Jika jumlah penduduk miskin di suatu daerah masih tinggi, hal ini tentu akan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan yang rendah membuat daya beli masyarakat menurun. Akibatnya,

kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan sulit dijangkau. Kehidupan yang layak pun menjadi sesuatu yang sulit diraih, sehingga kesejahteraan yang seharusnya mereka nikmati belum bisa terwujud (Trisno et al., 2022). Hal ini akan berdampak pada rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. Berikut data kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020-2024.

Tabel 1.4
Data Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pandeglang	9,92	10,72	9,32	9,27	9,18
Kabupaten Lebak	9,24	10,29	8,91	8,68	8,44
Kabupaten Tangerang	6,23	7,12	6,92	6,93	6,55
Kabupaten Serang	4,94	5,49	4,96	4,85	4,51
Kota Tangerang	5,22	5,93	5,77	5,89	5,43
Kota Cilegon	3,69	4,24	3,64	3,98	3,75
Kota Serang	6,06	6,79	5,94	6,20	5,65
Kota Tangerang Selatan	2,29	2,57	2,50	2,57	2,36

Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Berdasarkan tabel 1.4, terlihat bahwa angka kemiskinan di Provinsi Banten menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun di sebagian besar wilayah selama periode 2020 hingga 2024. Misalnya, Kabupaten Pandeglang yang pada tahun 2021 mencatat angka kemiskinan tertinggi sebesar 10,72%, berhasil menurunkannya menjadi 9,18% pada tahun 2024. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan konsisten menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah, bahkan hanya sebesar 2,36% di tahun 2024. Pola ini mencerminkan keterkaitan antara kemiskinan dengan akses ekonomi, peluang kerja, dan kualitas infrastruktur. Daerah dengan basis industri dan jasa cenderung memiliki angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan daerah agraris.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori kemiskinan, khususnya pendekatan struktural yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu seperti keterampilan dan pendidikan, tetapi juga sangat bergantung pada akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, dan kualitas institusi lokal. Wilayah-wilayah yang memiliki akses ekonomi yang lebih baik, seperti kota besar dan kawasan industri (misalnya Kota Cilegon atau Kota Tangerang), cenderung memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah, karena masyarakatnya lebih mudah terlibat dalam aktivitas produktif.

Selain itu, fenomena ini juga sejalan dengan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Nurkse (1953) menjelaskan bahwa ketika pendapatan masyarakat rendah, mereka sulit menabung dan berinvestasi. Akibatnya, kemiskinan pun sulit diatasi. Tanpa upaya nyata untuk meningkatkan pendapatan, menumbuhkan tabungan, atau mendorong investasi, kemiskinan akan terus berlangsung tanpa ujung (Sagala et al., 2024). Keadaan ini terjadi karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Kurangnya investasi dan kesempatan membuat masyarakat sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, sehingga mobilitas sosial dan ekonomi pun terhambat (Goni et al., 2022). Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar dalam melihat bagaimana kemiskinan berdampak langsung terhadap rendahnya capaian IPM. Kondisi ini tercermin di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, yang secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan tinggi dan capaian IPM yang rendah, menunjukkan betapa sulitnya daerah tertinggal keluar dari jeratan kemiskinan tanpa intervensi pembangunan yang menyeluruh.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena meskipun secara keseluruhan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten menunjukkan tren yang meningkat, namun kesenjangan antar kabupaten/kota masih cukup terasa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia belum berjalan secara merata dan berkelanjutan, terutama di wilayah seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang masih menghadapi berbagai

tantangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kondisi ini diperparah dengan adanya fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi serta tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di beberapa wilayah, yang secara signifikan memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum sepenuhnya merata dan belum berdampak optimal terhadap dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu dipahami secara mendalam bagaimana variabel-variabel ekonomi makro seperti Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan berpengaruh terhadap IPM di tingkat kabupaten/kota.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian di tingkat Nasional oleh Syofya & Shintia (2024) menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian oleh Ningrum et al (2020) yang juga meneliti di tingkat Nasional menemukan bahwa kemiskinan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM, sementara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak signifikan dan secara simultan semua variabel berpengaruh terhadap IPM. Di Kalimantan Selatan, (Putri & Suherty, 2024) menemukan bahwa Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IPM, tetapi kemiskinan berpengaruh negatif signifikan dan pengangguran berpengaruh positif tidak signifikan secara parsial. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Woyanti (2021) di Jawa Tengah menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sementara PDRB tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Temuan yang saling berbeda ini menunjukkan adanya dinamika lokal yang unik di tiap daerah, sehingga hasil suatu wilayah belum tentu dapat digeneralisasi ke wilayah lain.

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah membahas hubungan antara Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan IPM, baik pada

tingkat nasional maupun provinsi. Namun, kajian yang secara khusus mengupas keterkaitan ketiga variabel ekonomi tersebut terhadap IPM di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten masih tergolong terbatas. Terlebih lagi, belum banyak penelitian yang menggunakan data terkini dalam periode 2020–2024, yang merupakan masa yang penuh dinamika akibat dampak pandemi COVID-19 serta masa pemulihan ekonomi setelahnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dengan fokus pada Provinsi Banten dalam periode 2020–2024, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mutakhir mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan memengaruhi IPM di era pasca-pandemi.

Berdasarkan berbagai dinamika dan tantangan tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pengaruh variabel-variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Provinsi Banten. Hal ini menjadi landasan bagi penulis dalam merumuskan penelitian yang berjudul: *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020–2024.”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pada tahun 2024, Kota Tangerang Selatan mencatat nilai IPM sebesar 84,16 poin yang termasuk dalam kategori sangat tinggi, sedangkan Kabupaten Lebak hanya mencapai 68,33 poin dan masih berada pada kategori sedang. Perbedaan ini mencerminkan bahwa upaya pembangunan manusia belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Banten.

2. Peningkatan IPM di Provinsi Banten tidak serta-merta disertai dengan penurunan signifikan dalam angka pengangguran dan kemiskinan, khususnya di wilayah Pandeglang dan Lebak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup (IPM) belum sepenuhnya merata atau berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.
3. Di beberapa daerah, ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Menurut teori *Human Capital* dan Pertumbuhan Endogen, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan seharusnya berdampak positif terhadap peningkatan IPM. Namun, realitas di Provinsi Banten menunjukkan bahwa tidak semua daerah mengikuti pola tersebut. Beberapa wilayah tetap mengalami peningkatan IPM meskipun indikator ekonominya belum sepenuhnya membaik.
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.
5. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.
6. Apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.
7. Apakah pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan secara simultan berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilakukan secara terfokus, maka penelitian ini menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.
2. Pengaruh Pengangguran terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.

3. Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.
4. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan secara bersama-sama (simultan) terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan secara simultan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh simultan pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2020-2024.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dan luaran penelitian yang diambil dari penelitian ini yaitu dapat berupa teoritis dan praktisi diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten.
- b. Dapat berkontribusi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai referensi, acuan, atau pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengarahkan pembangunan daerah dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam bentuk penelitian nyata.
- 2) Harapan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang masalah ekonomi yang terjadi disekitar lingkungan.

3. Luaran Penelitian

Target penelitian yaitu penelitian ini dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah di masa mendatang dan mampu menjadi pedoman serta membantu mengembangkan pengetahuan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan kemiskinan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dengan maksud penulis. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul ini, yaitu:

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan suatu daerah, yang pada

dasarnya menggambarkan peningkatan output barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, Pertumbuhan ekonomi diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2020–2024. Satuan yang digunakan adalah persen (%).

Pengangguran didefinisikan sebagai persentase penduduk usia kerja yang belum memiliki pekerjaan namun masih berusaha mencari pekerjaan secara aktif. Dalam penelitian ini, Pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja di setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten. Satuan yang digunakan adalah persen (%).

Kemiskinan merupakan keadaan di mana individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan secara layak. Dalam penelitian ini, Kemiskinan diukur melalui persentase penduduk miskin, yaitu jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total penduduk di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten. Satuan yang digunakan adalah persen (%).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu daerah, berdasarkan tiga aspek utama, yaitu pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup, dan standar hidup layak yang diukur melalui pendapatan per kapita. IPM dinyatakan dalam angka dari 0 hingga 100, di mana semakin tinggi angka IPM, semakin baik tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa judul skripsi ini mengacu pada suatu kajian mengenai

kondisi pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten pada periode 2020-2024.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan *Human Development Report* (HDR). Gagasan ini hadir sebagai respons terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu berfokus pada aspek ekonomi semata. UNDP menekankan bahwa manusia bukan hanya sekadar alat dalam proses pembangunan, tetapi juga menjadi tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif, memiliki umur panjang dan sehat, memperoleh pendidikan yang layak, serta menikmati standar hidup yang memadai. Dalam laporannya, UNDP juga merekomendasikan alat ukur untuk menilai capaian pembangunan manusia yang kemudian dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (BPS, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan efektivitas program pembangunan di suatu wilayah secara menyeluruh. IPM merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana dampak dari kinerja pembangunan di suatu wilayah. Indikator ini mencakup berbagai dimensi penting, karena menggambarkan kualitas hidup penduduk melalui tiga aspek utama: harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak (Ashari & Athoillah, 2023). IPM disusun dari beberapa komponen utama yang mencerminkan aspek-aspek penting dalam pembangunan manusia, yaitu (Efendi et al., 2024):

a. Kesehatan (Angka Harapan Hidup)

Harapan hidup saat lahir menggambarkan rata-rata usia yang diperkirakan akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian yang berlaku saat ini tidak berubah

sepanjang hidupnya. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kesehatan dan layanan kesehatan di suatu negara. Semakin tinggi angka harapan hidup, biasanya mencerminkan sistem kesehatan yang lebih baik serta kondisi hidup yang lebih layak bagi masyarakatnya.

b. Indeks pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) melibatkan dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

1) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka harapan lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang diperkirakan akan dijalani oleh seorang anak usia sekolah dalam menempuh pendidikan sepanjang hidupnya. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. HLS menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, yang ditunjukkan melalui jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Indikator ini mencerminkan sejauh mana akses dan kesempatan pendidikan tersedia di suatu negara, serta memberikan gambaran tentang potensi pendidikan yang dapat dinikmati oleh anak-anak dan remaja di masa depan.

2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk menilai pencapaian pendidikan yang nyata di kalangan orang dewasa, serta mencerminkan kualitas dan efektivitas sistem pendidikan yang telah berjalan dalam suatu masyarakat.

c. Standar Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal sebagai Tingkat pendapatan diukur melalui *Gross National Income* (GNI) per kapita yang telah disesuaikan

dengan paritas daya beli (PPP), sehingga mencerminkan daya beli masyarakat secara lebih adil. Indikator ini memberikan gambaran mengenai rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu dan digunakan untuk menilai tingkat kemakmuran ekonomi serta kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai sebuah proses untuk memperluas berbagai pilihan hidup yang tersedia bagi masyarakat, khususnya dalam aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dalam upaya pembangunan manusia, terdapat empat hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan, agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara menyeluruh dan berkelanjutan (Ashari & Athoillah, 2023).

Rumus yang umum untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu:

$$\text{IPM} = 1/3 \times (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

Keterangan:

X1 : harapan hidup atau lama hidup seseorang.

X2 : menunjukkan tingkat pendidikan.

X3 : standar hidup layak, yang diukur melalui kemampuan daya beli.

Pendekatan ini memungkinkan IPM menjadi indikator komprehensif yang menggabungkan aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, sehingga mampu mencerminkan secara lebih menyeluruh kondisi pembangunan manusia di suatu Negara.

Berdasarkan nilai IPM, pembangunan manusia dibagi ke dalam tiga kategori yaitu IPM dengan nilai di bawah 50 termasuk dalam kategori rendah, IPM dengan nilai antara 50 hingga kurang dari 80 termasuk sedang atau menengah dan IPM dengan nilai 80 ke atas termasuk kategori tinggi (Ningrum et al., 2020).

UNDP secara berkala melakukan pembaruan dalam metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna meningkatkan

akurasi dan relevansinya. Pada tahun 2010, dilakukan perubahan yang cukup signifikan. Meskipun tetap mempertahankan tiga dimensi utama yaitu: kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. UNDP mengganti beberapa indikator yang digunakan.

- a. Indikator gabungan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) diganti dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS);
- b. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita digantikan oleh Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Selain perubahan indikator, metode perhitungan IPM pun disesuaikan. Agregasi IPM yang sebelumnya menggunakan rata-rata aritmatika, diubah menjadi rata-rata geometrik untuk menggambarkan keseimbangan antar dimensi secara lebih proporsional. Sementara itu, khusus untuk indeks pendidikan, agregasinya justru diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatika.

Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sebuah indeks komposit seharusnya benar-benar mencerminkan apa yang hendak diukur. Oleh karena itu, pemilihan metode dan indikator yang tepat menjadi kunci agar hasil yang diperoleh tetap relevan dan dapat dipercaya.

Metode baru dalam penghitungan IPM yang disempurnakan pada tahun 2014 memiliki sejumlah keunggulan penting. Salah satunya adalah penggunaan indikator yang lebih tepat dan mampu membedakan kondisi antar wilayah secara lebih akurat.

- a. Penggunaan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai kondisi pendidikan dan perkembangan akses pendidikan di suatu wilayah.
- b. Penggantian Produk Domestik Bruto (PDB) dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita dinilai lebih mencerminkan pendapatan riil yang dinikmati oleh masyarakat.

Selain itu, penerapan rata-rata geometrik dalam agregasi IPM menjadi keunggulan tersendiri, karena mencegah dominasi satu dimensi

terhadap dimensi lainnya. Artinya, keunggulan dalam satu aspek (misalnya pendidikan) tidak dapat menutupi kekurangan dalam aspek lain (seperti kesehatan atau pendapatan). Dengan pendekatan ini, pembangunan manusia yang ideal hanya dapat dicapai jika terdapat keseimbangan di antara ketiga dimensi utama yang sama-sama penting (BPS, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UHH LF SP 2020 merupakan IPM yang memanfaatkan data Umur Harapan Hidup (UHH) dari hasil *Long Form Sensus Penduduk 2020* sebagai indikator kesehatan. Perbedaannya dengan IPM standar terletak pada sumber data UHH yang digunakan. IPM standar biasanya mengambil data dari sumber lain yang bersifat lebih umum atau berasal dari periode waktu yang lebih lama. Dimensi kesehatan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetap diwakili oleh indikator usia harapan hidup saat lahir (UHH), yang mencerminkan sejauh mana layanan kesehatan dan kualitas lingkungan mendukung kehidupan masyarakat di suatu daerah. Dalam rangka menyesuaikan pengukuran dengan kondisi kependudukan terkini, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kalibrasi ulang terhadap indikator ini dengan menggunakan data hasil *Long Form Sensus Penduduk 2020* (LF SP2020).

Sejak diberlakukannya metode baru ini pada tahun 2021, penghitungan IPM menjadi lebih peka dalam mencerminkan dinamika pembangunan manusia, khususnya di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pembaruan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hasil IPM benar-benar mencerminkan realitas di lapangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Becker (1964), Teori *Human Capital* atau teori modal manusia menekankan bahwa manusia tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja biasa, tetapi juga sebagai aset penting dalam pembangunan ekonomi. Teori ini menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan keterampilan memegang peran penting

dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Teori ini berpijak pada pemikiran bahwa ketika negara atau individu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas manusia, seperti melalui pendidikan dan layanan kesehatan, maka hal tersebut akan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas inilah yang pada akhirnya memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas (Limbong & Haryanto, 2024).

Teori Investasi dalam Modal Manusia menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya dipandang sebagai aktivitas konsumtif, tetapi juga sebagai bentuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan keterampilan tenaga kerja berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Teori ini menjelaskan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Jika upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak penduduk yang memiliki pendidikan tinggi, semakin besar pula produktivitas nasional, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Todaro dan Smith, konsep *human capital* atau modal manusia merujuk pada pandangan bahwa individu dapat melakukan investasi terhadap dirinya sendiri, dengan tujuan untuk mencapai tingkat konsumsi dan kesejahteraan yang lebih tinggi di masa mendatang. Bentuk investasi tersebut terutama mencakup bidang pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka keterampilan dan kemampuannya pun cenderung meningkat, sehingga bisa menjadi lebih produktif. Di sisi lain, kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan. Untuk dapat memanfaatkan pendidikan secara optimal, seseorang memerlukan kondisi fisik yang sehat. Dengan kata lain,

pendidikan yang berkualitas perlu ditunjang oleh kondisi kesehatan yang baik agar proses pembelajaran dan produktivitas dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya manusia yang sehat dan terdidik menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan (Wulandari & Robertus, 2023).

Menurut Amartya Sen, teori pembangunan dikenal dengan istilah *capability approach* atau pendekatan kemampuan. Gagasan utamanya menekankan bahwa pembangunan tidak bisa hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana manusia memiliki kesempatan dan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang dianggap bernilai. Sen melihat pembangunan sebagai proses memperluas kebebasan nyata (*real freedoms*) yang dimiliki setiap individu, baik dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, akses ekonomi, partisipasi politik, maupun rasa aman. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan kapabilitas yang menekankan kualitas hidup manusia, pembangunan akan memiliki makna yang lebih mendalam (Amalia et al., 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai alat untuk melihat dan membandingkan sejauh mana kemajuan pembangunan manusia, baik antarnegara maupun antarwilayah. Pembangunan manusia menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi daerah yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dalam kondisi tersebut, sumber daya manusia (SDM) dapat menjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, kualitas SDM memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan suatu wilayah (Kiha et al., 2021).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah proses meningkatnya pendapatan nasional riil atau produk domestik secara berkelanjutan. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila terjadi peningkatan output riil yang dihasilkan masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi juga dapat

diartikan sebagai kenaikan output per kapita yang mencerminkan membaiknya taraf hidup penduduk, karena setiap orang rata-rata menikmati hasil produksi yang lebih besar (Ridwan & Nawir, 2021). Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang mendorong bertambahnya produksi barang dan jasa, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mulyaningsih, 2019). Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses yang terus berlangsung untuk membawa kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat yang berasal dari bertambahnya produksi barang dan jasa. Melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat, diharapkan kualitas hidup masyarakat pun ikut mengalami peningkatan.

Menurut Profesor Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan beragam barang dan jasa bagi masyarakatnya dalam jumlah yang lebih besar. Peningkatan kapasitas ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, pembaruan kelembagaan, serta penyesuaian ideologi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berkembang. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi mampu memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat dalam suatu periode tertentu. Perekonomian dikatakan tumbuh apabila pendapatan masyarakat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kontribusi terhadap produk domestik bruto turut menentukan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap. Adapun laju pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui perbandingan produk domestik bruto pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (Widya et al., 2024).

Keberhasilan pembangunan suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari capaian pertumbuhan ekonominya. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari meningkatnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya fasilitas pendidikan dan produksi barang modal, serta berkembangnya sektor jasa (Soleh, 2016).

Karena itu, setiap pemerintah daerah selalu berupaya menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perencanaan dan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan sebagai alat ukur untuk melihat aliran pendapatan dan pengeluaran dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi masyarakat (Purba et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi umumnya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya berdasarkan harga konstan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tidak hanya diperlukan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, tetapi juga distribusi pendapatan yang merata. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber dayanya. Semakin banyak dan semakin berkualitas sumber daya yang dimiliki, semakin besar pula peluang negara tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, peningkatan PDRB memiliki peran penting dalam memperkuat daya beli masyarakat. Ketika PDRB tumbuh, pendapatan per kapita cenderung naik, yang kemudian mendorong peningkatan konsumsi, kesejahteraan, dan secara tidak langsung turut mendukung perbaikan kualitas pembangunan manusia (Rontos, 2023). PDRB yang dihasilkan oleh setiap daerah sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang tersedia di wilayah tersebut. Keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor ini menyebabkan perbedaan besaran PDRB antar daerah (Hidayat et al., 2024).

Untuk menilai pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PE = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$ = PDRB tahun berjalan

$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan suatu negara. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi bahkan menjadi target utama dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, para ahli mengemukakan berbagai teori untuk menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi, antara lain teori pertumbuhan klasik, neoklasik, teori tahapan pertumbuhan Rostow, dan teori pertumbuhan baru.

Teori pertumbuhan klasik pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan pembagian kerja. Dari keduanya, faktor pertumbuhan penduduk dianggap paling penting, karena meningkatnya jumlah penduduk akan mendorong peningkatan produksi. Peningkatan produksi inilah yang pada akhirnya membuka ruang bagi terjadinya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih efisien (Malau et al., 2024).

Teori pertumbuhan Neo-Klasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini menekankan bahwa teknologi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2019).

Teori pertumbuhan Rostow menggambarkan proses pembangunan ekonomi layaknya sebuah pesawat yang bersiap untuk lepas landas. Menurutnya, perkembangan ekonomi suatu negara melalui lima tahapan utama. Pertama, tahap perekonomian tradisional, di mana produktivitas masih rendah karena sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, tahap prasyarat tinggal landas, saat masyarakat mulai mampu mengolah sumber daya alam sebagai sumber pendapatan dan menggunakan

kekuatan sendiri untuk meningkatkan taraf hidup. Ketiga, tahap tinggal landas (*take off*), yang ditandai dengan perubahan besar dalam pola produksi, terutama melalui revolusi industri. Keempat, tahap menuju kedewasaan, yaitu fase penerapan teknologi modern secara lebih luas dalam pemanfaatan sumber daya alam. Terakhir, kelima adalah tahap konsumsi tinggi, di mana masyarakat menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, salah satunya ditunjukkan dengan munculnya pergeseran tempat tinggal dari pusat kota ke pinggiran akibat kota besar menjadi pusat perekonomian (Prawoto, 2019).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru (*Endogen*) dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer yang menjelaskan bahwa perbedaan tingkat pertumbuhan antar daerah bisa terjadi karena faktor-faktor dari dalam daerah itu sendiri. Robert Lucas dan Paul Romer berpendapat bahwa tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi, wawasan luas, dan keterampilan profesional dapat mempercepat perkembangan teknologi dan industri. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kegiatan produksi nasional pun bisa tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan (Putri et al., 2024). Teori ini menekankan bahwa inovasi dan kemajuan teknologi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu ide utama dalam teori ini adalah konsep "*eksternalitas pengetahuan*," yaitu gagasan bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) tidak hanya menguntungkan pihak yang melakukannya, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan (Mukhyi, 2024).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu (Amalia et al., 2022):

1. Sumber daya manusia berperan besar karena kualitas tenaga kerja, baik dari segi keterampilan, pengetahuan, maupun kreativitas, menentukan kemampuan suatu negara dalam mengembangkan ekonominya. Tanpa tenaga kerja yang terampil, pertumbuhan akan terhambat, sedangkan

ketersediaan SDM yang memadai mampu mendorong pemenuhan kebutuhan ekonomi.

2. Sumber daya alam juga menjadi penopang utama. Negara dengan kekayaan alam yang melimpah biasanya memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dibandingkan negara dengan sumber daya terbatas, meskipun pemanfaatannya tetap bergantung pada kondisi lingkungan dan iklim.
3. Pembentukan modal melalui bangunan, mesin, maupun infrastruktur lain sangat penting dalam mendukung proses produksi. Semakin banyak modal yang tersedia, semakin tinggi pula kapasitas produksi dan output yang dapat dihasilkan.
4. pengembangan teknologi mendorong efisiensi dan produktivitas, terutama ketika sumber daya yang dimiliki terbatas. Negara yang mampu mengadopsi dan memanfaatkan teknologi secara tepat biasanya akan berkembang lebih pesat dibandingkan negara yang tertinggal dalam hal teknologi.
5. Faktor Sosial dan Politik, Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kondisi politik. Setiap negara memiliki adat istiadat, tradisi, nilai, serta keyakinan yang berbeda, dan semua itu bisa menjadi pendorong perkembangan ekonomi. Stabilitas politik berperan penting dalam menciptakan iklim yang kondusif sehingga aktivitas ekonomi berjalan lancar, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan produktivitas bertambah. Dalam lingkungan yang bebas dan stabil, masyarakat lebih mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya.

3. Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Pengangguran merupakan situasi di mana seseorang yang berada dalam usia produktif, yaitu antara 15 hingga 65 tahun, tidak memiliki pekerjaan.

Kondisi ini biasanya muncul ketika jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia (Runtunuwu, 2020).. Secara umum, pengangguran terjadi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, meskipun sedang aktif mencari pekerjaan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengalami kehilangan pendapatan dan penurunan kualitas hidup, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian secara keseluruhan, seperti terhambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya tekanan sosial, dan terganggunya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sukirno Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang sudah siap dan termasuk dalam kelompok orang yang aktif bekerja, tetapi saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan dengan upah tertentu, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan (Faizin, 2021) Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menurunkan kualitas hidup masyarakat karena membuat mereka sulit mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, pengangguran juga sering dipengaruhi oleh faktor struktural, misalnya ketika keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar kerja. Karena itu, mengurangi tingkat pengangguran menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi, agar masyarakat bisa lebih produktif dan hidup lebih sejahtera (Raffi, 2025).

Secara teoritis, pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain (Ridwan & Nawir, 2021):

- a. Pengangguran terbuka, terjadi ketika pertumbuhan peluang kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Akibatnya, semakin banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dalam perekonomian. Dalam jangka panjang, tenaga kerja ini tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi dan sepenuhnya menganggur secara nyata.
- b. Setengah menganggur (*underemployment*), terjadi ketika pekerja bekerja kurang dari jam kerja normal, yang biasanya sekitar 36 jam per minggu.

Pekerja yang bekerja di bawah jumlah jam tersebut digolongkan sebagai setengah pengangguran.

- c. Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*), terjadi ketika jumlah pekerja yang terlibat dalam suatu aktivitas ekonomi melebihi jumlah yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai tingkat produksi yang efisien. Dalam teori produksi, jenis pengangguran ini muncul saat Produktivitas Marginal perusahaan sudah berada di bawah nol, namun perusahaan atau organisasi tetap menambah tenaga kerja karena berbagai alasan atau pertimbangan.
- d. Pengangguran musiman sering terjadi di sektor pertanian, di mana nelayan dan penyadap karet tidak dapat bekerja selama musim hujan dan harus menunggu hingga musim tersebut berakhir. Situasi serupa juga dialami oleh petani saat musim kemarau, ketika lahan menjadi kering dan kekurangan air. Selama periode ini, para petani tidak dapat bekerja dan terpaksa menganggur hingga musim berubah.

Berdasarkan penyebab munculnya pengangguran, terdapat empat jenis pengangguran yaitu friksional, struktural, siklikal, dan teknologi (Agustin, 2022).

- a. Pengangguran friksional, terjadi ketika individu memerlukan waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya.
- b. Pengangguran struktural, timbul akibat perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja, dimana terdapat ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar.
- c. Pengangguran siklikal, disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil, saat perekonomian melemah, daya beli masyarakat menurun, dan perusahaan cenderung mengurangi produksi yang berakibat pada berkurangnya tenaga kerja.
- d. Pengangguran teknologi, terjadi ketika tenaga kerja digantikan oleh kemajuan teknologi yang modern, yang memungkinkan perusahaan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan.

Dalam konteks pembangunan manusia, pengangguran memiliki peran penting karena turut menentukan kualitas hidup masyarakat. Tingginya angka pengangguran sering kali berujung pada menurunnya pendapatan per kapita, meningkatnya ketimpangan ekonomi, dan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Lebih dari sekadar masalah ekonomi, pengangguran juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial. Selain itu, pembahasan mengenai pengangguran juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika pasar tenaga kerja. Dalam pandangan ekonomi makro, tingkat pengangguran dipengaruhi oleh seberapa seimbang hubungan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ketika pertumbuhan ekonomi berjalan lambat dan penciptaan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi penambahan jumlah angkatan kerja, maka angka pengangguran cenderung meningkat. Dengan demikian, pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan tantangan yang kompleks dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan terpadu, seperti penguatan pendidikan vokasi, pelaksanaan program padat karya, serta pemberdayaan sektor informal agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Goni et al., 2022). Menurut Todaro dan Smith, kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan maupun sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Dalam keadaan ini, seseorang menjalani hidup di bawah standar minimum yang dianggap layak, baik dari segi pendapatan, tempat tinggal, makanan, pakaian, layanan kesehatan, maupun kebutuhan pokok lainnya. Dari sudut pandang ini,

kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan seseorang dalam mencapai taraf hidup yang layak dan bermartabat sesuai dengan standar sosial dan ekonomi yang berlaku (Hera & Asmara, 2024).

Secara konseptual, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang layak. Kebutuhan tersebut mencakup akses terhadap makanan bergizi, tempat tinggal yang memadai, layanan pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya produktif. Dalam kerangka ekonomi, kemiskinan umumnya diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran seseorang yang berada di bawah ambang batas atau garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

Menurut Amartya Sen, kemiskinan bukan semata-mata persoalan kekurangan pendapatan, melainkan mencerminkan keterbatasan kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang ia anggap bermakna. Dalam pandangan ini, kemiskinan dipahami sebagai ketiadaan pilihan dan kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak dan bermartabat. Sebagai contoh, meskipun seseorang memiliki pendapatan tertentu, ia tetap dapat dikategorikan miskin jika tidak memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, atau tidak mampu berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan politik. Dengan demikian, kemiskinan lebih dari sekadar kekurangan materi; mencerminkan keterbatasan dalam mencapai kebebasan substantif yang dibutuhkan untuk menjalani hidup yang penuh makna (Ulya et al., 2025).

Teori lingkaran kemiskinan yang di kemukakan oleh Ragner Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena suatu negara terjebak dalam siklus keterbelakangan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan yang rendah, ketidaksempurnaan pasar, dan minimnya modal, menyebabkan produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah berdampak pada pendapatan yang kecil, yang pada akhirnya membatasi kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Kekurangan investasi menghambat akumulasi modal, sehingga penciptaan

lapangan kerja menjadi terbatas. Hal ini memperkuat rendahnya pendapatan dan menciptakan kemiskinan yang berulang. Nurkse menggambarkan ini dengan pernyataan, “Negara miskin tetap miskin karena kemiskinannya (Goni et al., 2022).

Kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan penyebab dan tingkat keparahannya.

- a. Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan yang sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. kemiskinan relatif mengacu pada keadaan seseorang yang pendapatannya berada di atas garis kemiskinan, namun masih berada dalam posisi yang rentan dan tertinggal dibandingkan dengan standar hidup rata-rata masyarakat.
- c. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi akibat kondisi sosial, ekonomi, atau budaya yang membatasi kemampuan individu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pada situasi ini, individu yang mengalami kemiskinan cenderung pasif atau tidak memiliki akses dan dorongan untuk melakukan perubahan, sehingga membutuhkan intervensi dari luar untuk dapat memperbaiki kondisi hidupnya (Faizin, 2021).

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mengulas beberapa studi sebelumnya yang akan dijadikan acuan dalam penulisan serta digunakan untuk menghindari plagiarisme. Berikut ini adalah ringkasan dari hasil penelitian-penelitian relevan yang mendukung penelitian ini:

1. Penelitian dilakukan oleh Ningrum et al. (2020) yang menganalisis pengaruh kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM di Indonesia pada periode 2014–2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak signifikan. Secara simultan semua variabel independen yaitu kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini dalam hal variabel kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi serta penggunaan regresi data panel, namun berbeda dalam ruang lingkup wilayah karena penelitian dilakukan pada tingkat nasional. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al (2020) menggunakan pendekatan nasional untuk tahun 2014–2018 dan menambahkan variabel pengeluaran pemerintah, sementara penelitian ini justru lebih spesifik secara spasial (kabupaten/kota di Banten) dan memperbarui cakupan waktu dengan mempertimbangkan dampak pandemi.

2. Penelitian lain dilakukan oleh Safitri et al. (2024) yang meneliti pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap IPM di Provinsi Lampung selama tahun 2014–2023. Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada penggunaan dua variabel yang sama, yaitu kemiskinan dan pengangguran, serta penggunaan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, penelitian ini tidak menyertakan variabel pertumbuhan ekonomi dan tidak menggunakan pendekatan data panel seperti dalam penelitian saat ini, serta periode waktu pengamatan dalam penelitian ini pada tahun 2020-2024.

3. Selanjutnya, penelitian oleh Faizin (2021) di Provinsi Jawa Timur meneliti pengaruh upah minimum, kemiskinan, dan pengangguran terhadap IPM pada periode 2010–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, kemiskinan berpengaruh negatif namun tidak signifikan, serta upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan

bahwa ketiga variabel independen, yaitu upah minimum, kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian ini memiliki persamaan dalam penggunaan pendekatan data panel dan analisis variabel kemiskinan dan pengangguran. Namun, terdapat perbedaan pada variabel ekonomi yang digunakan, di mana penelitian ini memakai Pertumbuhan ekonomi sedangkan Faizin menggunakan upah minimum. Selain itu, periode waktu pengamatan dalam penelitian ini pada tahun 2020-2024 yang mencakup masa saat dan setelah pandemi.

4. Penelitian lain dilakukan oleh Susilowati & Adianita (2023) yang menganalisis pengaruh pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Pengalaman dari Kabupaten Bojonegoro. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM secara parsial, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu pengangguran dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada variabel pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian tersebut tidak mencakup variabel kemiskinan dan menggunakan regresi linier berganda tanpa pendekatan data panel serta lokasi penelitian.

5. Penelitian yang lebih baru dilakukan oleh Rohaini (2024) yang menganalisis pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pengeluaran perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat selama periode 2019–2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh tidak signifikan, dan pengeluaran perkapita tidak berpengaruh yang signifikan terhadap IPM. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu

kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian ini relevan karena menggunakan variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta metode regresi data panel seperti halnya penelitian ini. Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan penting dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohaini (2024) memfokuskan kajiannya pada Provinsi Kalimantan Barat dan menyertakan variabel tambahan seperti pengeluaran perkapita, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Provinsi Banten yang mencakup kabupaten/kota dengan periode analisis 2020–2024 yang mencakup masa saat, dan setelah pandemi Covid-19, sebuah konteks yang belum banyak dianalisis secara spesifik di daerah ini.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suherty (2024) yang menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021 dengan menggunakan data panel dan metode regresi Fixed Effect Model. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan. Secara simultan ketiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap IPM di Kalimantan Selatan.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada variabel yang digunakan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran sebagai faktor yang memengaruhi IPM, serta sama-sama menggunakan data panel yang bersumber dari BPS dengan pendekatan kuantitatif.

Perbedaannya terletak pada lokasi dan periode penelitian, di mana penelitian Nabila dilakukan di 13 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012–2021, sedangkan penelitian ini difokuskan pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2020–2024. Selain itu, penelitian

ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji dinamika pembangunan manusia di Banten dalam periode yang lebih mutakhir, khususnya pada masa pasca-pandemi COVID-19.

7. Penelitian yang lebih baru dilakukan oleh Pratama et al. (2025) yang mengkaji pengaruh kemiskinan, PDRB, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2019–2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PDRB berpengaruh positif dan signifikan, sementara rata-rata lama sekolah tidak signifikan, dan angka harapan hidup berpengaruh positif signifikan. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen, yaitu kemiskinan, PDRB, Rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Penelitian ini relevan karena menggunakan variabel PDRB dan kemiskinan, serta metode regresi data panel seperti halnya penelitian ini. Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan penting dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al (2025) memfokuskan kajiannya pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mereka menyertakan variabel tambahan seperti angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Provinsi Banten dengan periode analisis 2020–2024 yang mencakup masa saat, dan setelah pandemi Covid-19, sebuah konteks yang belum banyak dianalisis secara spesifik di daerah ini.

C. Keterkaitan Antar Variabel

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini pada gilirannya memperluas kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang merupakan tiga dimensi utama dalam pengukuran IPM. Dengan demikian, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap layanan publik dan peningkatan kesejahteraan.

Namun demikian, hubungan ini tidak selalu berjalan secara otomatis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata dapat menimbulkan kesenjangan, sehingga manfaat pertumbuhan tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat. Jika pendapatan tidak merata dan sumber daya tidak dialokasikan dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup, maka peningkatan ekonomi tersebut belum tentu berdampak positif pada IPM. Sebaliknya, tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, upaya meningkatkan kesejahteraan juga akan terbatas. Jadi, keduanya harus berjalan beriringan agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas (Auliya et al., 2024). Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang merata, yakni pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan, akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan IPM.

2. Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Todaro dan Smith, pembangunan manusia merupakan proses pencapaian yang berakar pada kemampuan dan potensi yang dimiliki setiap individu. Dalam hal ini, pembangunan manusia menjadi elemen kunci bagi suatu negara dalam meningkatkan kemampuannya menguasai teknologi modern. Hal tersebut penting untuk memperluas kapasitas dalam menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya membantu mengurangi tingkat pengangguran serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ketika angka pengangguran menurun dan pendapatan masyarakat meningkat, dampaknya akan terlihat pada peningkatan kualitas hidup. Salah satunya adalah peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan penting seperti asupan gizi yang lebih baik dan pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga pengangguran pun dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi naik-turunnya nilai IPM (Runtuwuu, 2020).

3. Hubungan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemiskinan dan IPM saling memengaruhi satu sama lain. Ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mereka juga kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, sehingga IPM rendah. Sebaliknya, jika IPM terus meningkat, hal ini bisa membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, dan penghasilan yang lebih baik (Romandhon et al., 2024). Karena itu, fokus pada peningkatan IPM menjadi strategi penting dalam pembangunan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

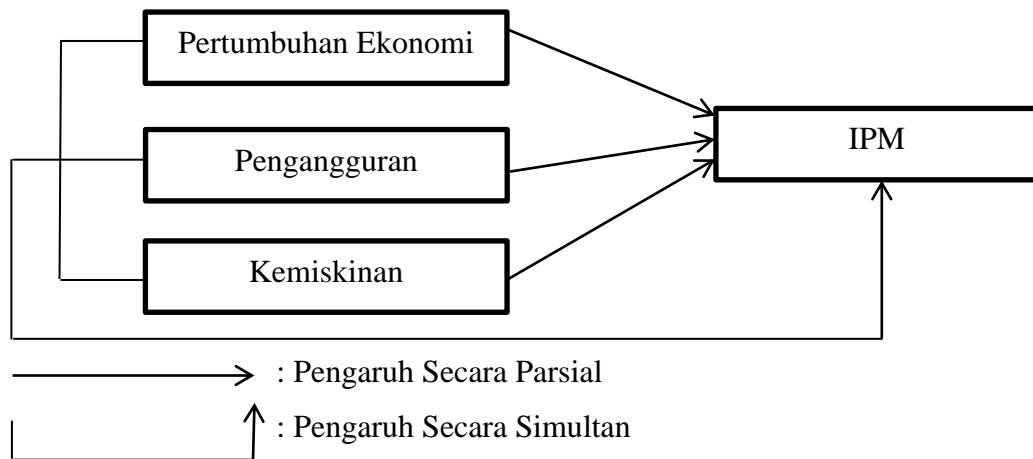
Kemiskinan punya dampak besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena menyentuh langsung tiga hal penting dalam kehidupan: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ketika seseorang hidup dalam kemiskinan, mereka sering kali kesulitan untuk mendapatkan layanan

kesehatan yang layak, tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan penghasilannya pun terbatas. Akibatnya, kualitas hidup mereka menurun dan hal ini tercermin dalam rendahnya IPM di suatu daerah. Lebih dari itu, kemiskinan bisa memicu berbagai masalah lain seperti gizi buruk, pengangguran, dan kurangnya keterampilan kerja. Semua ini memperlambat kemajuan pembangunan manusia. Karena itu, mengurangi kemiskinan bukan hanya soal ekonomi tapi juga tentang memberi kesempatan bagi setiap orang untuk hidup lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih sejahtera. Dengan begitu, IPM bisa meningkat secara berkelanjutan.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan landasan pemikiran dalam sebuah penelitian yang disusun berdasarkan hasil sintesis dari fakta, observasi, dan tinjauan literatur. Oleh sebab itu, kerangka berpikir mencakup teori, prinsip, atau konsep yang menjadi acuan utama dalam penelitian. Dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara detail dan sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bagan dapat digunakan untuk menunjukkan kerangka berpikir, yang menunjukkan alur pikiran peneliti serta hubungan antara variabel yang diteliti (Syahputri et al., 2023). Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berfikir pada penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten sebagai variabel terikat yang di pengaruhi oleh Pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan sebagai variabel bebas. Kerangka berpikir dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



E. Hipotesis

Hipotesis bisa dipahami sebagai sebuah dugaan sementara yang digunakan peneliti sebagai panduan awal dalam mencari solusi atas suatu masalah. Dugaan ini biasanya muncul dari hasil penalaran logis atas teori yang sudah ada, lalu dirumuskan menjadi hipotesis. Hipotesis ini kemudian perlu diuji kebenarannya dengan cara mengumpulkan data di lapangan. Jika data yang dikumpulkan mendukung hipotesis tersebut, maka hipotesis itu bisa berkembang menjadi sebuah tesis, yaitu kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan dan proses penelitian yang sistematis (Sari et al., 2023). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{01} : Tidak terdapat pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

H_{a1} : Terdapat pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

H_{02} : Tidak terdapat pengaruh Pengangguran terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

H_{a2} : Terdapat pengaruh pengangguran terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

H_{03} : Tidak terdapat pengaruh kemiskinan terhadap IPM Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

H_{a3} : Terdapat pengaruh kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

H_{04} : Tidak terdapat pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan kemiskinan secara simultan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

H_{a4} : Terdapat pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan kemiskinan secara simultan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, mengumpulkan data dengan instrumen penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hipotesis atau teori melalui pengukuran yang objektif dan sistematis (Amruddin et al., 2022).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel, yang menggabungkan data *time series* (tahun 2020–2024) dan *cross section* (kabupaten/kota di Provinsi Banten).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti melalui *website* BPS Provinsi Banten dengan tahun pengamatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Rancangan waktu penelitian yang telah peneliti rencanakan yaitu pada bulan Maret tahun 2025 sampai 15 Agustus 2025.

Tabel 3.1
Rancangan Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Penyusunan proposal						
2.	Bimbingan proposal						
3.	Seminar proposal						
4.	Penyusunan surat izin penelitian						

5.	Penelitian						
6.	Pengolahan data						
7.	Bimbingan Skripsi						
8.	Sidang munaqasah						
9.	Perbaikan setelah siding						

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian populasi merujuk pada area generalisasi yang mencakup individu atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sembiring et al., 2024).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang berjumlah 8 Kabupaten/Kota:

- 1) Kabupaten Pandeglang
- 2) Kabupaten Lebak
- 3) Kabupaten Tangerang
- 4) Kabupaten Serang
- 5) Kota Tangerang
- 6) Kota Cilegon
- 7) Kota Serang
- 8) Kota Tangerang Selatan

2. Sampel

Sampel merupakan bagian jumlah dan karakteristik dari populasi yang diteliti untuk menggeneralisasikan kesimpulan dari penelitian (Zulfikar et al., 2024). Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus, artinya seluruh anggota populasi dijadikan sampel tanpa ada yang dikecualikan. Dalam hal ini, semua delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten diamati selama lima tahun, sehingga terkumpul 40 data observasi (8 wilayah x 5 tahun). Pendekatan ini digunakan karena jumlah populasinya tergolong kecil dan penelitian bersifat panel, yang merupakan

gabungan antara data deret waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data *cross section* dalam penelitian ini terdiri dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, sedangkan data *time series* mencakup rentang waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang diperoleh dari website BPS Provinsi Banten.

D. Sumber Data

sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan, melainkan berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini bisa didapatkan melalui lembaga resmi, artikel jurnal, laporan pemerintah, maupun dokumen dari perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui publikasi, catatan, atau dokumen yang telah tersedia, dan kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk mendukung analisis dalam penelitian (Soesana et al., 2023).

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, dan kemudian penulis kumpulkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian, mencakup data Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020-2024. Dalam penelitian ini, data IPM menggunakan data IPM UHH LF SP2020 dimana indeks kesehatan yaitu umur harapan hidup (UHH) diperoleh melalui perhitungan langsung dari Long From Sensus Penduduk 2020 yang dipublikasi oleh BPS. Pendekatan ini digunakan untuk menjaga konsistensi antar tahun dan wilayah selama periode pengamatan 2020 hingga 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini memerlukan langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk

memperoleh data yang valid, reliable, dan sesuai dengan realistik (Nashrullah et al., 2023).

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk menghimpun informasi yang relevan. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan melihat, membaca, mempelajari dan mencatat informasi yang terkait dengan objek penelitian. Data tersebut diakses melalui www.banten.bps.go.id berupa data pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020-2024.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dirancang untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik Eviews 12. Eviews dipilih sebagai alat bantu pengolahan data karena kemampuannya dalam mengelola data panel, termasuk menghasilkan model *random effect* dan *fixed effect*. Selain itu, Eviews juga dapat membantu menentukan model yang paling sesuai untuk analisis data panel melalui uji chow, uji hausman, dan uji LM.

Menurut Basuki (2021) data panel merupakan gabungan dari data *cross-sectional* (lintas individu) dan *time-series* (runtun waktu). Analisis regresi data panel adalah metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel yang diteliti, yaitu variabel dependen dan independen, dengan menggunakan jenis data panel (gabungan data waktu dan data antar wilayah). Hal ini sejalan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan, yaitu untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan memengaruhi IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten selama periode 2020-2024. Dalam penelitian ini, variabel yang menjadi variabel terikat (*dependen*) adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara terdapat tiga variabel bebas (*independent*) yaitu Pertumbuhan ekonomi (X1), pengangguran (X2) dan kemiskinan (X3).

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian dengan menggunakan regresi data panel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Napitupulu et al (2021) dalam analisis regresi dengan data panel, terdapat tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk mengestimasi model:

a. Model Common Effect

Model Efek Umum (*Common Effect Model*) atau dikenal juga sebagai *Pooled Least Square* (PLS). Pendekatan ini adalah yang paling sederhana karena hanya menggabungkan data dari waktu ke waktu (*time series*) dan antar unit atau wilayah (*cross section*), tanpa membedakan karakteristik masing-masing. Artinya, model ini mengasumsikan bahwa setiap unit memiliki perilaku yang sama sepanjang waktu. Estimasinya dapat dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil.

b. Fixed Effect Model

Model Fixed Effect menganggap bahwa setiap individu atau unit, seperti perusahaan, memiliki karakteristik unik yang bisa ditangkap melalui perbedaan nilai intersep. Untuk menangkap perbedaan ini, digunakan teknik variabel dummy, yang memungkinkan kita melihat pengaruh khusus dari masing-masing individu. Perbedaan intersep ini bisa disebabkan oleh hal-hal seperti budaya kerja, gaya manajemen, atau sistem insentif yang berbeda. Meskipun begitu, model ini mengasumsikan bahwa pengaruh variabel independen (slope) tetap sama untuk semua individu. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

c. Random Effect Model

Model Random Effect digunakan untuk mengestimasi data panel ketika kemungkinan terdapat hubungan antar variabel gangguan, baik dari waktu ke waktu maupun antar individu. Dalam pendekatan ini, perbedaan antar individu tidak ditangkap lewat intersep tetap seperti pada

Fixed Effect, tetapi dimasukkan ke dalam komponen error masing-masing individu. Salah satu keunggulan model ini adalah kemampuannya untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Model ini juga dikenal dengan sebutan *Error Component Model* (ECM) atau menggunakan teknik *Generalized Least Square* (GLS).

2. Uji Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai secara statistik, ada tiga jenis uji yang bisa digunakan, yaitu Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test. Ketiga uji ini membantu memilih apakah model yang tepat adalah *Common Effect*, *Fixed Effect*, atau *Random Effect*, tergantung pada karakteristik data yang digunakan.

a. Uji Chow

Chow Test digunakan untuk membantu menentukan apakah model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *Common Effect* dalam analisis data panel. Uji ini melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antar individu atau entitas dalam data. Rumus pengujian ini menguji hipotesis berikut:

H_0 (hipotesis nol): Model yang digunakan cukup menggunakan *Common Effect* (tidak ada perbedaan antar individu).

H_1 (hipotesis alternatif): Perlu menggunakan *Fixed Effect Model*, karena terdapat efek khusus pada masing-masing individu.

Jika hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas (p-value) untuk cross section F statistik kurang dari 0,05, maka menolak hipotesis nol (H_0). Artinya, model *Fixed Effect* lebih cocok digunakan. Namun, jika nilai probabilitas tersebut lebih dari 0,05, maka menerima hipotesis nol (H_0), yang berarti model *Common Effect* lebih tepat dipakai (Wijaya et al., 2024).

b. Uji Hausman

Hausman Test adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang lebih tepat digunakan dalam analisis data panel. Uji ini bertujuan untuk memastikan apakah model FEM memang lebih tepat dibandingkan dengan *Random Effect Model* (REM) dalam konteks penelitian ini. Pengambilan keputusan dari uji hausman yaitu jika nilai probabilitas > 0.05 maka model yang terpilih adalah REM, dan jika nilai probabilitas < 0.05 maka model yang terpilih adalah FEM. Berikut ini merupakan hasil uji Hausman yang dilakukan dengan menggunakan *metode Correlated Random Effects Hausman Test* (Nani, 2022).

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dibandingkan model *Common Effect* (OLS). Hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model Common Effect lebih baik.

H_1 : Model Random Effect lebih baik.

Ketika p-value di bawah 0,05, itu menandakan ada perbedaan varians residual yang signifikan, sehingga model *Random Effect* lebih tepat daripada model *Common Effect* (Wijaya et al., 2024).

3. Uji Asumsi Klasik

Dalam penerapan analisis regresi linear dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS), terdapat sejumlah uji asumsi klasik yang perlu dilakukan guna memastikan bahwa model yang dibangun bersifat valid dan dapat menghasilkan estimasi yang reliabel. Beberapa pengujian tersebut antara lain meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan metode statistik untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Analisis regresi berganda sebagai alat statistik parametrik memerlukan pemenuhan asumsi normalitas

distribusi normal pada sampel penelitian (Indartini & Mutmainah, 2024). Salah satu cara mengujinya adalah dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Pengambilan keputusan dari uji normalitas yaitu jika nilai probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan antara residu pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Metode yang paling umum digunakan dalam uji autokorelasi yaitu metode Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun kriteria penentuan hasil pengujian sebagai berikut (Machali, 2021):

- 1) Jika $0 < dw < dl$, berarti ada autokorelasi positif
- 2) Jika $4 - dl < dw < 4$, berarti ada autokorelasi negative
- 3) Jika $2 < dw < 4 - du$ atau $du < dw < 2$, berarti tidak ada autokorelasi positif/negatif
- 4) Jika nilai $du < dw < 4 - du$ maka tidak terjadi autokorelasi

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen. Ketika variabel-variabel independen memiliki tingkat korelasi yang tinggi satu sama lain, maka hal ini bisa mengganggu keakuratan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam model penelitian. Pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel independen. Jika nilai korelasinya kurang dari 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model (Nani, 2022).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah varian data sama atau berbeda dalam model regresi. Jika varian dan residual memiliki pengamatan yang tetap maka disebut homoskedastisitas dan

jika berbeda maka terjadi heteroskedastisitas (Zahriyah et al., 2021). Pengambilan keputusan dari uji heteroskedastisitas yaitu jika nilai probabilitas < 0.05 maka data terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai probabilitas > 0.05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji Glejser digunakan untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas.

4. Persamaan Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data panel, yaitu kombinasi antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Proses analisis dilakukan dengan bantuan software EViews 12. Secara umum, bentuk dasar persamaan regresi data panel yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut (Basuki, 2021):

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan:

Y	: Variabel dependent (IPM)
α	: Konstanta
$X_1 X_2 X_3$: Variabel independent (Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan)
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi masing-masing variabel independen
e	: <i>Error Term</i>
t	: <i>Time series</i>
i	: <i>Cross section</i>

5. Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi (R^2)

Hipotesis adalah dugaan sementara yang dibuat untuk mengetahui apakah suatu pernyataan atau hubungan benar atau tidak. Untuk membuktikannya, hipotesis perlu diuji melalui data dan analisis statistik. Hipotesis terdiri dari dua jenis, yaitu hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada pengaruh atau hubungan, dan hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan ada pengaruh atau hubungan. Pengujian hipotesis bisa

dilakukan secara keseluruhan (simultan) atau satu per satu (parsial), dengan rincian sebagai berikut:

a. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah (Sahir, 2021). Penentuan nilai t-tabel dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5%. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam pengujian ini:

- 1) Jika nilai Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai Probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Sahir, 2021). Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel atau dengan melihat nilai probabilitasnya sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam pengujian ini:

- 1) Jika nilai Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai Probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi, yang biasa disimbolkan dengan R^2 digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel yang ingin dijelaskan. etika nilai yang diperoleh relatif kecil atau mendekati nol, hal tersebut menunjukkan bahwa

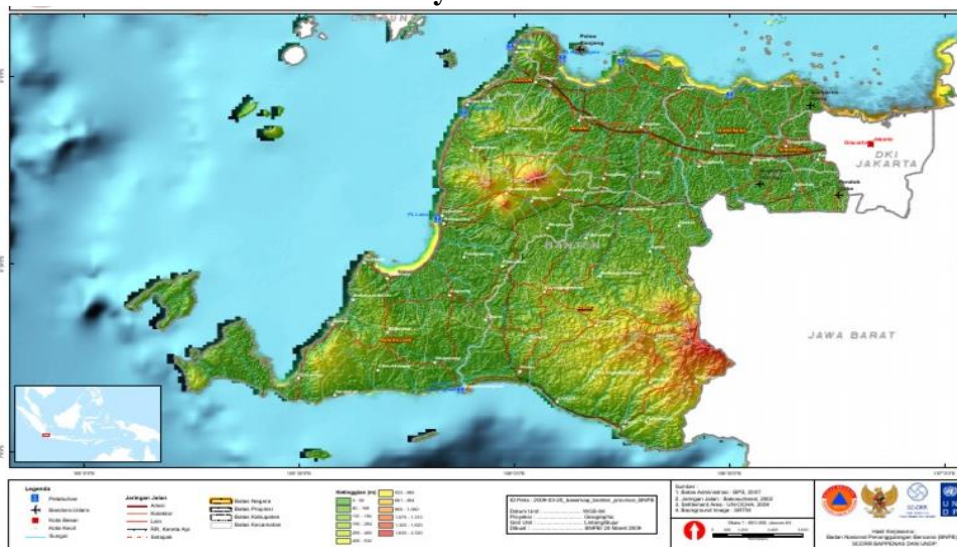
variabel independen hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap variabel dependen. Sementara, jika nilainya mendekati 100%, berarti variabel bebas punya pengaruh yang besar terhadap variabel terikat dalam model tersebut (Sahir, 2021).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Banten merupakan salah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang berada di ujung barat Pulau Jawa dan memiliki ibu kota di Kota Serang. Provinsi ini resmi dibentuk pada 4 Oktober tahun 2000, setelah dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Letaknya yang sangat strategis membuat Banten berperan penting sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera melalui Pelabuhan Merak, sekaligus menjadi daerah penyangga bagi Ibu Kota Negara, DKI Jakarta, baik dari sisi ekonomi, transportasi, maupun demografi. Berikut gambar peta wilayah Provinsi Banten.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Provinsi Banten



Secara geografis, Provinsi Banten memiliki luas wilayah sekitar 9.662,92 km². Letaknya sangat strategis karena dikelilingi oleh berbagai wilayah penting. Di bagian utara, Banten berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sementara di sebelah timur, provinsi ini berbatasan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Di bagian selatan terbentang Samudera Hindia, dan di barat terdapat Selat Sunda yang menjadi jalur pelayaran penting penghubung Pulau

Jawa dan Sumatra. Secara astronomis, Provinsi Banten berada di antara $5^{\circ}7'50''-7^{\circ}1'1''$ LS dan $105^{\circ}1'11''-106^{\circ}7'12''$ BT. Secara administratif, Provinsi Banten terbagi menjadi 8 wilayah, terdiri dari 4 kabupaten (Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang) dan 4 kota (Cilegon, Serang, Tangerang, dan Tangerang Selatan). Jumlah keseluruhan wilayah di bawahnya mencakup sekitar 155 kecamatan, 313 kelurahan dan 1.238 desa yang tersebar di seluruh Provinsi Banten.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi Banten pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 12.431,39 ribu jiwa. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di kawasan Tangerang Raya, yang mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Wilayah ini tumbuh sangat pesat karena menjadi pusat industri, perdagangan, dan permukiman. Sementara itu, daerah di bagian selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak masih didominasi oleh sektor pertanian dan memiliki pembangunan infrastruktur yang belum secepat wilayah utara. Secara topografi, Wilayah Banten memiliki kondisi alam yang beragam. Di bagian utara dan barat, wilayahnya cenderung datar, sedangkan di bagian selatan didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Daerah seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak memiliki banyak kawasan hutan yang dilindungi. Salah satu kawasan penting di sana adalah Taman Nasional Ujung Kulon, yang dikenal secara internasional dan telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO.

Sektor ekonomi Provinsi Banten memiliki banyak potensi yang menjanjikan. Beberapa sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini meliputi industri pengolahan, perdagangan, jasa, serta transportasi dan logistik. Di wilayah selatan, masyarakat banyak menggantungkan hidup pada pertanian dan perikanan. Selain itu, pariwisata juga menjadi daya tarik tersendiri, dengan tempat-tempat populer seperti Pantai Anyer, Tanjung Lesung, dan berbagai wisata alam lainnya yang kerap dikunjungi wisatawan.

Kedekatan Banten dengan Jakarta, ditambah dengan infrastruktur yang semakin berkembang, menjadikan provinsi ini sebagai salah satu kawasan yang

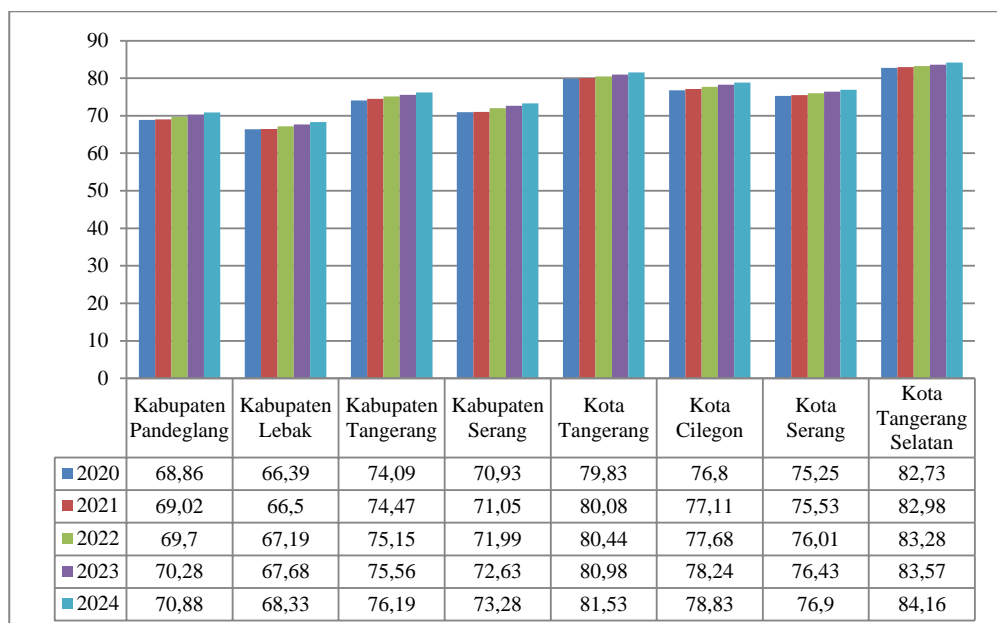
menarik bagi para investor. Aktivitas ekonomi pun tumbuh pesat, terutama di wilayah perkotaan dan industri. Namun, di balik kemajuan tersebut, Banten masih menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti kesenjangan pembangunan antarwilayah, tingginya angka pengangguran, serta tingkat kemiskinan yang belum sepenuhnya teratasi. Masalah-masalah ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan agar pembangunan dapat berlangsung secara lebih merata dan berkelanjutan.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan sejauh mana pembangunan telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini mengukur tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Melalui ketiga dimensi tersebut, IPM membantu melihat secara lebih menyeluruh bagaimana pembangunan berdampak pada kesejahteraan manusia, bukan hanya dari sisi ekonomi semata.

**Grafik 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Secara umum, Provinsi Banten menunjukkan tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh kabupaten dan kota selama periode 2020 hingga 2024. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat bahwa setiap daerah mengalami pertumbuhan IPM yang positif dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih terlihat kesenjangan yang cukup mencolok antara wilayah kabupaten dan kota, di mana daerah perkotaan cenderung mencatat capaian IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Pada tahun 2024, Kota Tangerang Selatan mencatat capaian IPM tertinggi di Provinsi Banten, yakni sebesar 84.16 poin. Posisi berikutnya ditempati oleh Kota Tangerang dengan IPM 81.53 poin, dan Kota Cilegon sebesar 78.83 poin. Angka-angka ini mencerminkan bahwa wilayah perkotaan di Banten umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Sebaliknya, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang menjadi dua daerah dengan IPM terendah, masing-masing sebesar 68.33 poin dan 70.88 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah masih cukup nyata, khususnya antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

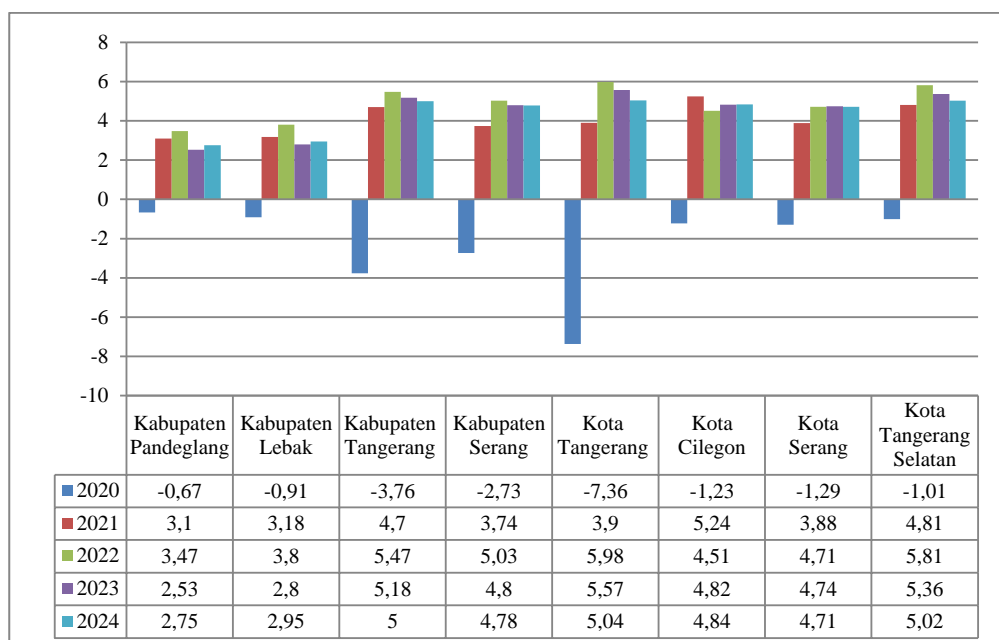
Secara keseluruhan, tren peningkatan IPM di Provinsi Banten sepanjang periode 2020–2024 mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, kesenjangan antarwilayah masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Upaya untuk memastikan pembangunan manusia yang merata dan berkeadilan di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Banten perlu terus diperkuat, agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini pada dasarnya menggambarkan sejauh

mana peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa terjadi dalam suatu wilayah. Salah satu ukuran yang umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik secara total maupun per kapita, yang menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui bagaimana kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperbaiki kesejahteraan secara umum. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan ekonomi sangat relevan untuk memahami kondisi pembangunan manusia, khususnya dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini, data yang digunakan merupakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2020 hingga 2024, yang mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Rincian data tersebut disajikan dalam bentuk grafik berikut ini:

Grafik 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten menunjukkan pola yang berfluktuasi. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan tekanan besar terhadap perekonomian, sehingga hampir seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan tajam. Misalnya, pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang turun drastis hingga -7,36%, sementara di Kabupaten Tangerang mencapai -3,76%. Kontraksi ini mencerminkan terganggunya berbagai sektor ekonomi akibat pembatasan aktivitas dan melemahnya daya beli masyarakat. Meski demikian, sejak 2021 hingga 2023 sebagian besar daerah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup stabil dan mengalami penurunan pada tahun 2024, hal ini ditandai dengan kembalinya tren pertumbuhan positif sebagai hasil dari pemulihan aktivitas ekonomi secara bertahap.

Selama periode tersebut, beberapa wilayah di Provinsi Banten menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Salah satunya adalah Kota Tangerang, yang mencatat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,98% dan berhasil mempertahankan kinerja ekonominya dengan stabil di atas 5% hingga tahun 2024. Tren positif serupa juga terlihat di Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang, yang menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang cukup kuat setelah masa krisis pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki kapasitas adaptasi dan daya tahan ekonomi yang relatif baik dalam menghadapi tekanan eksternal.

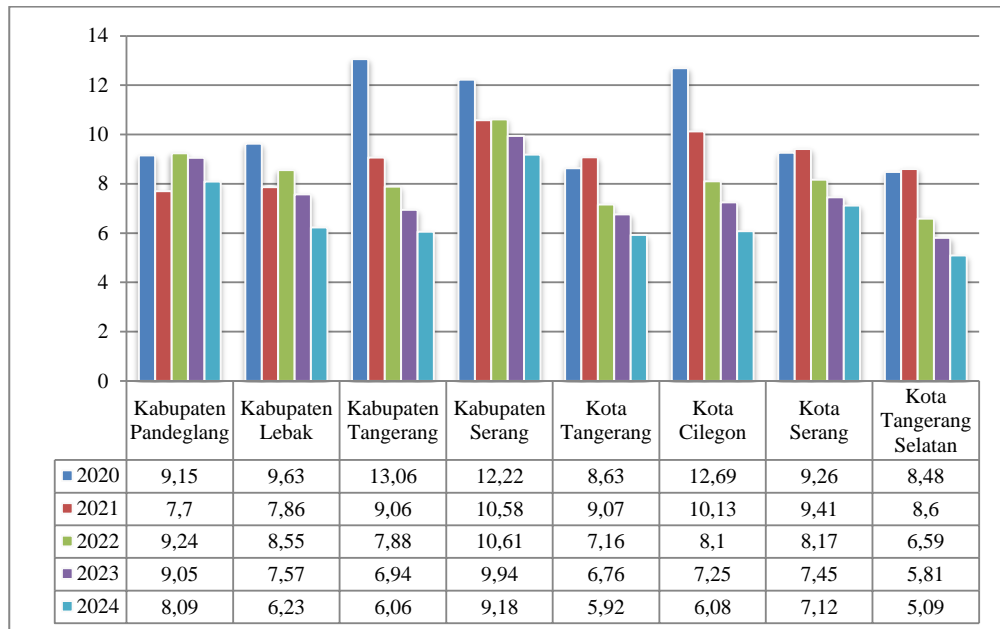
Wilayah Tangerang Raya, yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Banten karena didukung oleh berbagai faktor strategis. Letaknya yang berdekatan langsung dengan Jakarta menjadikan kawasan ini bagian dari wilayah megapolitan Jabodetabek, sehingga mendapatkan limpahan aktivitas ekonomi dari ibu kota. Selain itu, Tangerang Raya memiliki banyak kawasan industri besar yang menopang sektor manufaktur, logistik, dan perdagangan, serta

didukung oleh infrastruktur yang lebih maju seperti jalan tol, bandara internasional Soekarno-Hatta, dan jaringan transportasi yang baik. Aktivitas sektor jasa dan perdagangan juga sangat berkembang, khususnya di Kota Tangerang Selatan yang dikenal sebagai kawasan hunian dan bisnis modern. Tingkat urbanisasi yang tinggi dan dominasi penduduk usia produktif turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan produktivitas. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan Tangerang Raya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Banten, yang secara konsisten menyumbang PDRB tertinggi dibandingkan daerah lainnya.

3. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan suatu daerah. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya memengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengangguran yang tinggi dapat membatasi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, mengakses pendidikan, serta memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Penelitian ini menggunakan data tingkat pengangguran yang diambil dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2020 hingga 2024, yang ditampilkan melalui grafik berikut:

Grafik 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

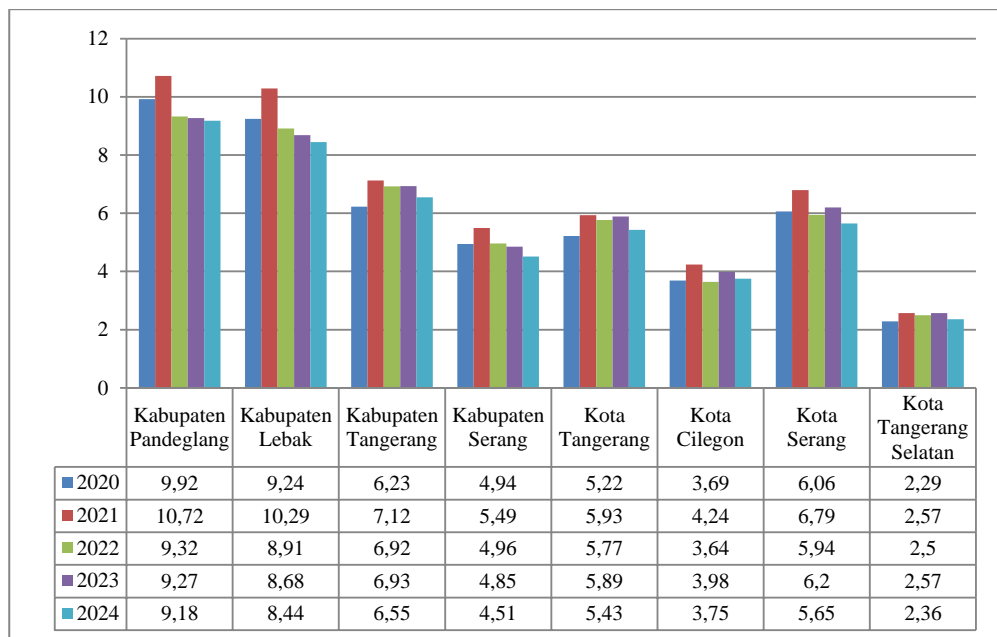
Selama periode 2020 hingga 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok. Puncaknya terjadi pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda dan memberikan tekanan besar pada dunia kerja di seluruh wilayah. Kabupaten Tangerang mencatat angka pengangguran tertinggi, yakni 13,06%, disusul oleh Kota Cilegon sebesar 12,69% dan Kabupaten Serang sebesar 12,22%. Di sisi lain, Kota Tangerang Selatan mencatat TPT yang relatif lebih rendah, yaitu 8,48%. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi kemampuan antarwilayah dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja di tengah krisis.

Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi setelah pandemi, tingkat pengangguran di Provinsi Banten secara umum mulai menunjukkan penurunan. Pada tahun 2024, Kota Tangerang Selatan mencatat angka pengangguran terendah, yaitu 5,09%, disusul oleh Kota Tangerang sebesar 5,92%. Namun demikian, tantangan masih terlihat di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Serang, yang mencatat TPT tertinggi sebesar 9,18%. Perbedaan ini mencerminkan bahwa pemulihan pasar kerja belum merata di seluruh daerah.

4. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam pencapaian pembangunan manusia secara optimal, karena berpengaruh langsung terhadap dimensi standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penelitian ini, data kemiskinan yang digunakan merupakan data persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024. Rincian data tersebut disajikan dalam bentuk grafik berikut ini:

Grafik 4.4 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Banten 2024

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Banten tahun 2024, persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Banten mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, angka kemiskinan sempat meningkat pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, kemudian menurun secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Kabupaten

Pandeglang dan Kabupaten Lebak secara konsisten menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten. Pada tahun 2020, Kabupaten Pandeglang mencatat angka 9,92% dan meningkat menjadi 10,72% pada 2021, sebelum menurun kembali menjadi 9,18% pada 2024. Pola serupa terjadi di Kabupaten Lebak, dari 9,24% di tahun 2020 naik menjadi 10,29% pada tahun 2021, lalu turun menjadi 8,44% di tahun 2024.

Sementara itu, daerah dengan angka kemiskinan paling rendah secara konsisten adalah Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskinnya hanya sebesar 2,29% dan meskipun sempat naik menjadi 2,57% pada tahun 2021, angka ini kembali turun menjadi 2,36% di tahun 2024. Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang juga tergolong memiliki tingkat kemiskinan rendah, masing-masing mencatat 3,75% dan 6,55% pada tahun 2024. Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang menunjukkan tren yang serupa, yaitu kenaikan pada masa pandemi dan penurunan setelahnya. Misalnya, Kota Tangerang naik dari 5,22% (2020) ke 5,93% (2021) lalu turun menjadi 5,43% pada 2024, sementara Kota Serang dari 6,06% ke 6,79% lalu turun ke 5,65%.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pandemi sempat memperburuk kondisi kemiskinan di seluruh wilayah Provinsi Banten, namun mulai mengalami perbaikan dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Meski demikian, ketimpangan antarwilayah masih cukup terlihat, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih merata dan terfokus, khususnya di wilayah-wilayah yang secara konsisten mencatat angka kemiskinan tinggi seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

C. Temuan Hasil Penelitian

1. Pemilihan Teknik Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel, terdapat tiga pendekatan estimasi yang umum digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan pendekatan mana yang paling tepat digunakan dalam penelitian, perlu dilakukan

beberapa pengujian terlebih dahulu. Pengujian tersebut meliputi uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, yang masing-masing berfungsi untuk membandingkan dan memilih model terbaik berdasarkan karakteristik data yang digunakan.

a. Uji Chow

Chow Test digunakan untuk membantu menentukan apakah model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *Common Effect* dalam analisis data panel (Wijaya et al., 2024). Hasil keputusan jika nilai probabilitas > 0.05 maka model terbaik adalah CEM, jika nilai probabilitas < 0.05 maka model terbaik adalah REM. Berikut hasil uji Chow dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Hasil Uji Chow

Effect Test	Probabilitas
Cross-section F	0.0000

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* sebesar $0.0000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dalam penelitian ini. Karena model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* FEM, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hausman.

b. Uji Hausman

Setelah hasil uji Chow menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM), maka analisis dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman untuk memastikan pemilihan model yang paling sesuai. Uji ini bertujuan untuk memastikan apakah model FEM memang lebih tepat dibandingkan dengan *Random Effect Model* (REM) dalam konteks penelitian ini. Pengambilan keputusan dari uji hausman yaitu jika nilai probabilitas > 0.05 maka model yang terpilih adalah REM, dan jika nilai probabilitas < 0.05 maka model yang terpilih

adalah FEM. Berikut ini merupakan hasil uji Hausman yang dilakukan dengan menggunakan *metode Correlated Random Effects Hausman Test* (Nani, 2022).

Tabel 4.2
Hasil Uji Hausman

Effect Test	Probabilitas
Cross-section F	0.0627

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Lampiran 4)

Dari hasil output yang diperoleh, diketahui bahwa nilai probabilitas dari *Cross-section F* sebesar $0.0627 > 0.05$ sehingga H_1 ditolak dan hipotesis H_0 diterima. Dengan demikian, model *Random Effect Model* (REM) dinyatakan sebagai model yang paling sesuai untuk penelitian ini.

Pada tahap awal, pengujian dilakukan dengan uji Chow yang hasilnya menunjukkan bahwa model yang lebih sesuai adalah Fixed Effect Model. Selanjutnya, pengujian dilanjutkan dengan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect dan Random Effect. Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model. Oleh karena itu, uji Lagrange Multiplier (LM) tidak dilakukan karena model terbaik sudah terpilih melalui uji Hausman.

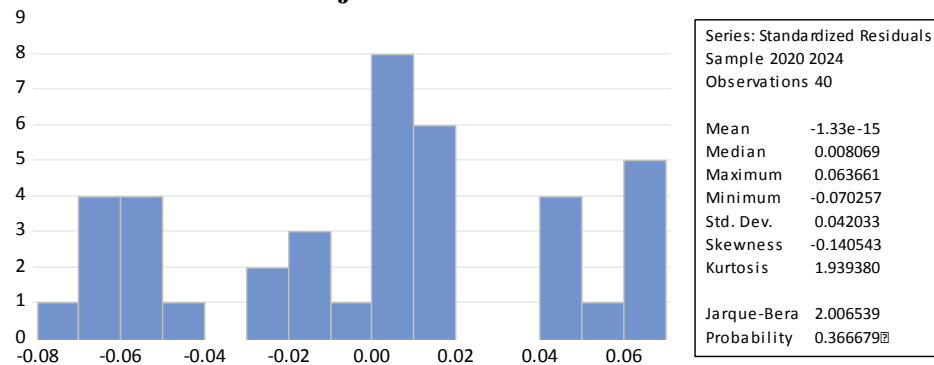
2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan metode statistik untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Analisis regresi berganda sebagai alat statistik parametrik memerlukan pemenuhan asumsi normalitas distribusi normal pada sampel penelitian (Indartini & Mutmainah, 2019). Salah satu cara mengujinya adalah dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Pengambilan keputusan dari uji normalitas yaitu jika nilai probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai probabilitas < 0.05

maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Uji Normalitas



Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Lampiran 5)

Berdasarkan output di atas, nilai probabilitas dari uji Jarque-Bera sebesar $0.366679 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier yang kuat antar variabel bebas dalam model (Basuki, 2021). Pengambilan keputusan dari uji multikolinearitas yaitu jika nilai probabilitas < 0.80 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam data, sebaliknya jika nilai probabilitas > 0.80 maka data terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas

	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	TPT (X2)	Kemiskinan (X3)
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	1.000000	-0.546687	-0.131166
TPT (X2)	-0.546687	1.000000	0.063886
Kemiskinan (X3)	-0.131166	0.063886	1.000000

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Lampiran 6)

Nilai koefisien korelasi antara X1 dan X2 sebesar $-0.546687 < 0.80$, korelasi antara X1 dan X3 sebesar $-0.131166 < 0.80$ dan korelasi antara X2 dan X3 sebesar $0.063886 < 0,80$, maka artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji Heteroskedastisitas yaitu untuk memeriksa apakah varian data sama atau berbeda dalam model regresi. Apabila varians dari residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan, kondisi ini disebut sebagai homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varians residual berubah-ubah antar pengamatan, maka terjadi heteroskedastisitas (Zahriyah et al., 2021). Pengambilan keputusan dari uji heteroskedastisitas yaitu jika nilai probabilitas < 0.05 maka data terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai probabilitas > 0.05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji Glejser digunakan untuk mendeteksi masalah ini. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob.	Alpa	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	0.4955	0.05	Tidak terjadi <i>heterokedastisitas</i>
Pengangguran	0.9282		Tidak terjadi <i>heterokedastisitas</i>
Kemiskinan	0.8018		Tidak terjadi <i>heterokedastisitas</i>

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Lampiran 7)

Hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode Glesjer menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) sebesar 0.4955; Pengangguran (X2) sebesar 0.9282; dan Kemiskinan (X3) sebesar 0.8018, yang semuanya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel dalam penelitian ini tidak mengalami heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan antara residu pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Metode yang paling umum digunakan dalam uji autokorelasi yaitu metode Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun kriteria penentuan hasil pengujian sebagai berikut (Machali, 2021):

- 1) Jika $0 < dw < dl$, berarti ada autokorelasi positif
- 2) Jika $4 - dl < dw < 4$, berarti ada autokorelasi negative
- 3) Jika $2 < dw < 4 - du$ atau $du < dw < 2$, berarti tidak ada autokorelasi positif/negatif
- 4) Jika nilai $du < dw < 4 - du$ maka tidak terjadi autokorelasi

Berikut hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

N	K	d_L	d_U	$4 - d_L$	$4 - d_U$	DW	Ket.
40	3	1.3384	1.6589	2.6616	2.3411	1.670251	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Lampiran 8)

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil uji autokorelasi menggunakan metode Durbin Watson (DW) menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2.315082. Sementara itu, nilai 4 dikurangi batas atas ($4 - d_U$) adalah 2.3411 dan nilai 4 dikurangi batas bawah ($4 - d_L$) sebesar 2.6616. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan, nilai $du < dw < 4 - du$, yaitu $1.6589 < 1.670251 < 2.3411$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak mengalami autokorelasi.

3. Persamaan Regresi Data Panel

Hasil dari beberapa pengujian yang dilakukan untuk memilih metode estimasi yang tepat dalam regresi data panel menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) merupakan model yang paling sesuai. Dasar

pemilihan ini mengacu pada hasil uji Panel Least Square, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7
Model Yang Terpilih *Random Effect Model* (REM)

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
C	4.428658	247.0960	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	0.001154	2.999059	0.0049
Pengangguran (X2)	-0.002768	-3.771593	0.0006
Kemiskinan (X3)	-0.015055	-7.369954	0.0000

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Lampiran 9)

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Model* (REM), diperoleh persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan, dengan variabel dependen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \mathbf{B}X_1 + \mathbf{B}X_2 + \mathbf{B}X_3 + e$$

$$= 4.428658 + 0.001154X_1 - 0.002768X_2 - 0.015055X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- Berdasarkan hasil estimasi, nilai intersep (α) sebesar 4.428658 menunjukkan bahwa ketika semua variabel bebas (X_1 , X_2 , dan X_3) berada pada nilai nol, maka nilai Y diperkirakan sebesar 4.428658. Dengan kata lain, ini merupakan nilai dasar dari Y sebelum dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut.
- Nilai koefisien beta variabel X_1 sebesar 0.001154, yang berarti jika X_1 meningkat satu satuan, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0.001154, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa X_1 memiliki pengaruh positif terhadap Y.
- Nilai koefisien beta variabel X_2 bernilai -0.002768, ini mengindikasikan bahwa peningkatan sebesar satu satuan pada variabel X_2 akan diikuti oleh penurunan nilai variabel Y sebesar 0.002768, jika variabel lain tetap. Ini menunjukkan bahwa X_2 memiliki pengaruh negatif terhadap Y.

- d. Nilai koefisien beta variabel X_3 bernilai -0.015055 . Artinya, kenaikan 1 satuan pada X_3 akan menyebabkan penurunan nilai Y sebesar 0.015055 , apabila variabel lainnya tetap. Ini menunjukkan bahwa X_3 memiliki pengaruh negatif terhadap Y .

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t) Pada Regresi dengan Metode *Random Effect Model* (REM)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah (Sahir, 2021). Uji statistik t (uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020–2024. Pengujian ini dilakukan secara parsial dengan bantuan software EViews 12. Pengujian dilakukan dengan acuan bahwa jika nilai signifikansi kurang dari $0,05$, maka hubungan antar variabel dinyatakan signifikan atau nilai t-hitung $>$ t-tabel, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan $>$ $0,05$ atau t-hitung $<$ t-tabel, maka hipotesis nol (H_0) diterima. Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, hasil uji disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji t Regresi Data Panel
Metode Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
C	4.428658	247.0960	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	0.001154	2.999059	0.0049
Pengangguran (X2)	-0.002768	-3.771593	0.0006
Kemiskinan (X3)	-0.015055	-7.369954	0.0000

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Lampiran 10)

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) menunjukkan hasil sebagai berikut:

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh nilai t-hitung sebesar $2.999059 > t\text{-tabel}$ sebesar 2.02809 dari nilai signifikan $0.0000 < 0.05$, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, artinya variabel pertumbuhan ekonomi (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.

2) Pengaruh pengangguran terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil uji t, variabel X2 (Pengangguran) memiliki nilai t-hitung sebesar $-3.771593 < t\text{-tabel}$ sebesar 2.02809, serta nilai signifikansi sebesar $0.0000 < 0.05$, maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, artinya variabel pengangguran (X2) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.

3) Pengaruh kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar $-7.369954 < t\text{-tabel}$ sebesar 2.02809. dan nilai signifikansi sebesar $0.0000 < 0.05$, maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, artinya variabel kemiskinan (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Banten tahun 2020-2024.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Sahir, 2021). Kriteria pengambilan keputusan pada uji statistik F yaitu jika nilai F-hitung $< F\text{-tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat

disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya, jika nilai F-hitung $>$ F-tabel dan nilai signifikansi $<$ 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Adapun hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji F (Simultan)

Variabel	F-statistik	Prob(F-statistik)
Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan	1326.397	0.0000

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Lampiran 10)

Berdasarkan hasil pengujian regresi, nilai F-hitung sebesar 1326.397 dengan nilai signifikansi 0.0000. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan F-tabel sebesar 2.866266 pada tingkat signifikansi 5% (dengan jumlah variabel independen 3 dan jumlah sampel 40). Karena F-hitung lebih besar dari F-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Banten. Dengan demikian, H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima.

c. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R-squared/ R^2) menunjukkan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (X) dalam model regresi. Dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi (R^2) menggunakan nilai R-square. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, maka prediksi yang dihasilkan oleh model semakin akurat, berikut hasilnya disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.10
Hasil Uji Determinasi R²

Variabel	R-squared
Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan	0.744329

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (Lampiran 11)

Pada penelitian ini, nilai R-squared sebesar 0.744329. Artinya, sekitar 74.43% variasi pada variabel Y, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat dijelaskan oleh variabel X₁, X₂ dan X₃, yaitu Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan memberikan kontribusi sebesar 74.43% terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Sementara itu, sisanya sebesar 25.57% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji “Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020–2024. Untuk memperoleh hasil yang valid, analisis dilakukan menggunakan model regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman guna menentukan model yang paling tepat. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Setelah seluruh tahapan pengujian tersebut dilakukan, pembahasan dilanjutkan dengan menelaah secara lebih mendalam pengaruh masing-masing variabel terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Hasil analisis data panel dengan menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Banten selama periode 2020–2024. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah mampu mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan ekonomi memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai program-program sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Secara argumentatif, hubungan positif ini dapat dijelaskan dari bagaimana hasil pertumbuhan ekonomi didistribusikan. Ketika ekonomi tumbuh, masyarakat memperoleh tambahan pendapatan yang dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memperbesar basis penerimaan daerah, sehingga memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan belanja publik pada sektor yang langsung berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Hal ini sejalan dengan Teori Pertumbuhan Endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dapat tercapai jika suatu daerah terus berinvestasi pada hal-hal penting seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB suatu wilayah, maka semakin besar pula peluang bagi daerah tersebut untuk memperkuat kualitas SDM-nya, yang pada akhirnya akan tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain itu, hasil temuan ini juga sejalan dengan Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Gary S. Becker. Dalam teorinya, Becker menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan bukan hanya penting bagi individu, tetapi juga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ekonomi daerah tumbuh, masyarakat pun mendapat akses yang lebih baik terhadap sekolah yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, yang tercermin melalui naiknya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Lebih lanjut, hasil ini sejalan dengan teori pembangunan Amartya Sen, yang menekankan pentingnya kemampuan (*capabilities*) individu untuk menjalani hidup yang layak. Pertumbuhan ekonomi yang positif menyediakan sumber daya dan peluang yang memungkinkan masyarakat memperluas kebebasan dan kemampuan mereka, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai instrumen yang meningkatkan kapasitas manusia untuk berkembang, sehingga secara langsung meningkatkan IPM.

Fenomena ini tercermin secara nyata di wilayah Tangerang Raya seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, di mana tingginya nilai PDRB berkontribusi terhadap capaian IPM yang tertinggi di Provinsi Banten. Kedua kota ini tumbuh pesat karena didukung oleh sektor jasa dan industri yang berkembang, serta didukung oleh infrastruktur sosial yang jauh lebih memadai dibandingkan daerah lain seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Keunggulan ini tak lepas dari peran kota-kota tersebut sebagai pusat ekonomi, tempat berkumpulnya banyak perusahaan nasional maupun multinasional, serta kemudahan akses transportasi dan logistik yang mendukung aktivitas ekonomi secara menyeluruh.

Sebaliknya, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan sektor perekonomian. Kedua wilayah ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan yang

cenderung memiliki nilai tambah lebih rendah. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur, kurangnya investasi, serta rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah membuat alokasi untuk pendidikan dan kesehatan menjadi terbatas, sehingga memengaruhi IPM secara keseluruhan. Dengan demikian, peningkatan Pertumbuhan ekonomi secara nyata mendukung pembangunan manusia karena membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian terdahulu. Misalnya, Susilowati & Adianita (2023) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro, serta Sudana & Sudarsani (2021) di Provinsi Bali dan Pratama et al. (2025) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga menunjukkan hubungan serupa. Kesamaan hasil ini memperkuat bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan manusia.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat argumen teoritis yang ada, tetapi juga memperluas bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB berperan penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memperkuat aspek pembangunan manusia. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Provinsi Banten sebaiknya tidak hanya fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan agar peningkatan IPM terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota.

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM), ditemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Banten selama periode 2020–2024. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah

capaian IPM suatu daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran dapat menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Individu yang mengalami pengangguran umumnya menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya akibat rendahnya tingkat pendapatan yang mereka peroleh. Kondisi ini secara langsung memengaruhi capaian IPM, terutama dalam hal standar hidup dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Secara argumentatif, pengangguran yang tinggi tidak hanya mencerminkan ketidakefisienan dalam pasar tenaga kerja, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas agregat wilayah. Ketika sebagian besar penduduk usia produktif tidak terserap ke dalam dunia kerja, maka kontribusi mereka terhadap pembangunan manusia menjadi terhambat. Situasi ini menegaskan pentingnya menciptakan lapangan kerja yang terbuka bagi semua kalangan dan berkelanjutan, agar peningkatan IPM benar-benar dapat dirasakan secara luas.

Secara teori, temuan ini sejalan dengan Teori *Human Capital* oleh Gary Becker, yang menekankan bahwa tenaga kerja merupakan bentuk modal manusia yang memiliki peran sentral dalam pembangunan. Ketika modal manusia tidak dimanfaatkan secara optimal dalam hal ini karena menganggur, maka potensi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat menjadi terhambat. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith yang menyebutkan bahwa tingginya pengangguran cenderung menurunkan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya berdampak langsung pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dalam perspektif teori pembangunan Amartya Sen (*capability approach*), pengangguran bukan hanya soal tidak adanya pekerjaan, tetapi juga soal berkurangnya kebebasan seseorang untuk menjalani hidup yang layak. Tanpa pekerjaan, seseorang kehilangan peluang untuk mendapatkan

pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik. Karena itu, pengangguran tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah ekonomi, melainkan juga sebagai masalah sosial yang langsung memengaruhi kualitas pembangunan manusia.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningrum et al. (2020) yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM secara nasional. Moh. Faizin (2021) dalam penelitiannya di Jawa Timur juga menyimpulkan bahwa pengangguran berdampak negatif dan signifikan terhadap IPM. Kesamaan hasil ini memperkuat bukti empiris bahwa pengangguran dapat menghambat peningkatan pembangunan manusia.

Dengan demikian, hasil ini memberikan gambaran empiris bahwa peningkatan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari efektivitas kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah di Provinsi Banten perlu merancang strategi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyerap tenaga kerja secara lebih luas dan merata, melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasional, serta pemberdayaan sektor informal. Hanya dengan demikian, pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif dapat tercapai.

3. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Hasil analisis data panel menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Banten selama periode 2020–2024. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu daerah, semakin rendah capaian IPM yang diperoleh. Kondisi ini menandakan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Temuan ini menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti

pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketiganya merupakan dimensi utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masyarakat yang berada dalam kondisi miskin umumnya memiliki daya beli yang rendah, sehingga sulit untuk memenuhi standar gizi, mendapatkan layanan kesehatan yang optimal, maupun mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya angka harapan hidup, pendeknya rata-rata lama sekolah, serta terbatasnya standar hidup layak yang dapat dicapai. Akumulasi dari berbagai keterbatasan ini pada akhirnya tercermin dalam menurunnya nilai IPM suatu wilayah.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan cenderung memicu keterbatasan dalam hal pendapatan, tabungan, dan investasi. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan dua aspek utama yang menjadi penopang Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketika masyarakat miskin tidak dapat mengakses layanan tersebut secara layak, kualitas hidup mereka pun menurun, yang pada akhirnya berdampak langsung pada rendahnya nilai IPM di suatu daerah. Fenomena ini tampak nyata di beberapa wilayah di Provinsi Banten, seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, yang dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan yang tinggi dan capaian IPM yang masih rendah.

Selain itu, temuan ini juga selaras dengan pandangan Amartya Sen yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan materi, tetapi juga keterbatasan dalam kapabilitas dan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Dalam konteks ini, masyarakat miskin tidak memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi mereka, yang menjadi hambatan utama dalam pencapaian pembangunan manusia yang menyeluruh.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu. Ningrum et al. (2020) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia. Handayani & Woyanti (2021) di Jawa Tengah juga menyimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Demikian pula penelitian Putri & Suherty (2024) di Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang konsisten bahwa kemiskinan menjadi faktor penghambat penting bagi peningkatan IPM. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa kemiskinan merupakan variabel yang secara konsisten menekan capaian pembangunan manusia di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu penghambat utama dalam mendorong pembangunan manusia. Dengan demikian, tindakan untuk mengatasi kemiskinan perlu menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Banten. Pemerintah perlu mengedepankan program-program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam memperbaiki kualitas hidup. Hanya dengan demikian, peningkatan IPM dapat dicapai secara adil dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/ kota Provinsi Banten.

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Secara Simultan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM), diketahui bahwa secara simultan Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Banten pada tahun 2020–2024. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara simultan memiliki peran dalam menjelaskan variasi yang

terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara kondisi ekonomi makro, ketersediaan lapangan kerja, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan membuka peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun jika masih disertai dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, maka pencapaian IPM cenderung terhambat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan IPM perlu dilakukan secara komprehensif, dengan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan teori *human capital* yang menekankan bahwa pembangunan manusia dipengaruhi oleh faktor ekonomi secara menyeluruh, baik dari sisi pendapatan maupun kesempatan kerja. Selanjutnya, teori pertumbuhan endogen juga menegaskan pentingnya investasi dalam modal manusia agar pertumbuhan ekonomi mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, teori kapabilitas Amartya Sen menjelaskan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai upaya memperluas kebebasan dan kesempatan manusia. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan manusia menuntut kombinasi pertumbuhan ekonomi yang stabil, rendahnya pengangguran, dan menurunnya kemiskinan.

Dalam konteks Provinsi Banten, terdapat kesenjangan yang cukup besar antarwilayah. Misalnya, Kota Tangerang Selatan memiliki IPM tertinggi karena didukung oleh ekonomi yang kuat, tingkat pengangguran yang rendah, dan angka kemiskinan yang kecil. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak masih tertinggal karena pertumbuhan ekonomi yang lambat, pengangguran yang relatif tinggi, dan tingkat kemiskinan yang cukup besar. Ini menggambarkan bahwa keberhasilan

pembangunan manusia di berbagai wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu. Ningrum et al. (2020) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia. Demikian pula penelitian Faizin (2021) di Jawa Timur menunjukkan bahwa variabel ekonomi secara bersama-sama memengaruhi IPM. Sejalan dengan itu, Susilowati & Adianita (2023) juga menemukan pengaruh simultan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap IPM. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa kombinasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan merupakan faktor penentu penting dalam peningkatan IPM di berbagai daerah. Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat pembangunan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten selama periode 2020–2024, yang dilakukan dengan pendekatan regresi data panel melalui *Random Effect Model* (REM), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.
2. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu daerah, semakin rendah kualitas pembangunan manusianya karena berkurangnya daya beli dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
3. Kemiskinan juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi umumnya menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup penduduknya.
4. Secara simultan, ketiga variabel tersebut Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi dan sosial daerah memiliki kontribusi yang besar dalam mendorong pembangunan manusia.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Banten, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dengan memberikan dukungan investasi di daerah yang masih tertinggal seperti Pandeglang dan Lebak, dan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi perlu diarahkan untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat melalui alokasi anggaran yang memadai di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.
2. Penurunan pengangguran harus menjadi fokus melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
3. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perluasan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga prasejahtera.

Dengan menjalankan ketiga pendekatan tersebut secara bersamaan, diharapkan pembangunan manusia di Provinsi Banten tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga lebih merata antarwilayah, sehingga kesenjangan yang selama ini ada bisa perlahan berkurang.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut::

1. Bagi Pemerintah Daerah

Perlu memperkuat sinergi antara kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada sektor industri semata, tetapi juga mampu menjangkau kelompok masyarakat

rentan di wilayah dengan IPM yang masih rendah, seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan awal bagi kalangan akademisi dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat daerah dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti belanja daerah, tingkat partisipasi pendidikan, atau kualitas infrastruktur agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi IPM.

3. Bagi Masyarakat Umum dan Pelaku Usaha

Peran aktif masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah perlu diperkuat, baik melalui partisipasi dalam program pemerintah maupun melalui kolaborasi usaha lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L. (2022). Pengaruh Pengangguran, Ipm, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *EKONIKA: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(2), 262. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i2.2221>
- Amalia, F., Sinaga, R., Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., ... & Ladjin, N. (2022). *Ekonomi pembangunan*. Penerbit Widina.
- Amruddin, Priyanda, R., Agustina, T. S., & Ariantini, S. N. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka.
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di kawasan tapal kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 313-326.
- Auliya, M., Saharuddin, & Trisniarti, N. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional (PDRB) dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembnagunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 37–46.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Efendi, B., Nasution, D. P., Rusiadi, & Pratiwi, D. (2024). *Teori Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi*. Tahra Media Group.
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>
- Goni, N., Klangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 121–132.
- Hamid, A., & Yusuf, Z. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh. *Jurnal Emt Kita*, 7(3), 676-683.
- Handayani, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, dan Belanja Modal Terhadap IPM DI 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011-2019. *BISECER (Kewirausahaan Ekonomi Bisnis)*, 4(2), 17–26.

- Hera, M. H. G. D., & Asmara, K. (2024). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2023. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 28-36.
- Hermawan, A. (2015). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. PT Grasindo.
- Hidayat, T., Anisanur, T., Mahendra, R. L., & Kurniawan, M. (2024). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Diprovinsi Lampung Tahun 2021-2021. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(3), 212-228.
- Indartini, M., & Mutmainah, M. (2024). *Analisis data kuantitatif: Uji instrumen, uji asumsi klasik, uji korelasi, dan regresi linier berganda (teori dan praktik)*. Lakeisha, Jawa Tengah.
- Izzah, C. I., & Hendarti, I. M. (2021). Analisis pengaruh tenaga kerja, tingkat upah, dan PDRB terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2, 99-106.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu. *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 2(7), 60-83.
- Laode, M., Engka, D. S. M., & Sumual, J. I. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(2).
- Limbong, M. J., & Haryanto, H. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4).
- Malau, M., Damanik, D., & Panjaitan, P. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pergeseran Struktur Perekonomian Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(1), 114-123.
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., Tajuddin, Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *JPEP: Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 82-95.
- Mukhyi, M. A. (2024). *Teori ekonomi*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Mulyaningsih, D. (2019). *Pembangunan ekonomi*. CV Kimfa Mandiri.

- Nani, S.E. (2022). *Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*. Visi Intelegensia.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Pengolahan Data dan Aplikasi Software Statistik (SPSS, Stata, EViews) untuk Penelitian Bisnis*. Universitas Darma Agung.
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Prastiwi, I. W., Amalia, D., & Khairani, S. (2025). Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 297-305.
- Pratama, I. P. Y. W., Luluk Fadliyanti, & Ahmad Zaenal Wafik. (2025). Pengaruh Kemiskinan, PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 148–168. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.212>.
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. RajaGrafindo Persada.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Fariied, A. I., Lie, D., Fazira, N., Rozaini, N., Tanjung, R., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Putri, A. A., Aryazeta, A. A., Fu'ad, Z., Ismikarimah, Devi, Y., & Kurniati, E. (2024). Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 182–192.
- Putri, N. F & Suherty, L. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 365–325.
- Raffi, M. (2025). Analisis Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 135–139. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.407>
- Raihan, A. M. (2025). Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten/Kota Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2023. *Musyteri: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 18(10).
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1049-1062.
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Ekonomi Publik*. Pustaka Belajar.
- Romandhon, R., Jannata, R., & Maulidi, R. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2013 Sampai 2021). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 63–71. <https://doi.org/10.32699/jamasy.v4i1.6763>
- Rontos, A. S. P., Kawung, G. M. V, Tumangkeng, S. Y. L., Pembangunan, J. E., & Dan, F. E. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4), 133–144.
- Runtuwu, P. C. H. (2020). Analysis of Macroeconomic Indicators and It's Effect on Human Development Index (HDI). *Society*, 8(2), 596–610. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.246>
- Safitri, A. D., Vrasetya, E. P., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. *JBEP: Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(2), 13–27.
- Sagala, I. F., Romadhoni, A. F., Mardiana, A., Widyasari, A., Simamora, D. R., Nurfadiah, D., ... Sihotang, R. F. (2024). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara menggunakan metode regresi linear berganda. *Konstanta: Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(2), 309–324.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Sari, A., Dahlan, Tuhumury, R. A. N., & Prayitno, Y. (2023). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV Angkasa Pelangi.
- Sembiring, T. Br., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. CV Jaya Baya.
- Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, K., Fitri, A., Kuswandi, S., Sastri, L., ... & Lestari, H. (2023). Metodologi penelitian kuantitatif.
- Soleh, A. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Model Pertumbuhan Endogenius. *Journal Development*, 4(2), 18-26.

- Sudana, S. N., & Sudarsani, N. P. (2021). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(2), 240–248.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Suryani. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal EkonomCOSTING: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(6), 5975–5988.
- Susilowati, D., & Adianita, H. (2023). Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Pengalaman dari Kabupaten Bojonegoro. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 2(1), 77-98.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Syofya, H., & Shintia. (2024). Pengaruh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7), 3844–3856. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.4162>
- Trisno, T. U., Munajat, & Oktarina, Y. (2022). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Keuangan*, 4(8), 3560–3566.
- Ulya, S. K., Rindiani, R., Masitoh, G., Oktaviani, C. D., & Rezola, A. R. (2025). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(3), 100-123.
- Widya, W., Fitri, E. A., Setiani, N., Ridha, A., & Asnidar, A. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 167-186.
- Wijaya, E., Suprayitno, D., Ladini, U., Nengsih, T. A., Sumiyarti, S., Sudrimo, S. N., Kusumastuti, Y. Y., Nurhayati, N., & Hulu, D. (2024). *Buku ajar ekonometrika (Cetakan pertama)*. Jambi, Indonesia: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wulandari, D. D., & Robertus, M. H. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2021. *Diponegoro Journal of Economics*, 12(4), 39-53.

- Zahriyah, A., Suprianik, S., Agungparmono, A., & Mustofa, M. (2021). *Ekonometrika: Teknik dan aplikasi dengan SPSS*. Mandala Press, Jawa Timur.
- Zulfikar, R., Sari, F. P., Fatmayati, A., & Wandini, K. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. CV Widina Media Utaam.